

Peran Dewan Pengawas Syariah, Transparansi, dan Risiko Kredit di Bank Syariah

SKRIPSI

ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana strata-1 di Program Studi Manajemen,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia



Oleh:

Nama : Anisa Nugrahaeni
Nomor Mahasiswa : 17311076
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 22 Maret 2021

Penulis,



Anisa Nugrahaeni

Peran Dewan Pengawas Syariah, Transparansi, dan Risiko Kredit di Bank Syariah

SKRIPSI

Disetujui untuk diujikan
23 Maret 2021



Abdur Rafik., SE., M.Sc.



Ditulis oleh:

Nama : Anisa Nugrahaeni
Nomor Mahasiswa : 17311076
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

Peran Dewan Pengawas Syariah, Transparansi, dan Risiko Kredit di Bank Syariah

Nama : Anisa Nugrahaeni
Nomor Mahasiswa : 17311076
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 23 Maret 2021

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Abdur Rafik, S.E., M.Sc.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

**TUGAS AKHIR BERJUDUL
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, TRANSPARANSI, DAN
RISIKO KREDIT DI BANKSYARIAH**

Disusun Oleh : **ANISA NUGRAHAENI**

Nomor Mahasiswa : **17311076**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Rabu, 02 Juni 2021

Penguji/ Pembimbing Tugas Akhir : Abdur Rafik, S.E., M.Sc.



Penguji : Zaenal Arifin, Dr., M.Si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang akan dicapai. Pertama, menguji peran transparansi terhadap risiko kredit di bank syariah. Kedua, menguji pengaruh moderasi dari peran Dewan Pengawas Syariah terhadap hubungan antara transparansi dengan risiko kredit di bank syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari transparansi sebagai variabel independen, risiko kredit sebagai variabel dependen, Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel moderasi, serta lima variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, *leverage*, efisiensi, pertumbuhan aset, dan *operating leverage*. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 30 bank syariah yang sudah terdaftar di dalam OJK periode 2015-2019. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap risiko kredit. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan adanya peran dari jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang dapat memperkuat hubungan antara transparansi dengan risiko kredit.

Kata kunci: Transparansi, Risiko Kredit, Dewan Pengawas Syariah, dan Bank Syariah.

ABSTRACT

This research has two main objectives to be achieved. First, examining the role of transparency on credit risk in Islamic banks. Second, testing the moderating effect of the role of the Sharia Supervisory Board on the relationship between transparency and credit risk in Islamic banks. The variables used in the study consist of the transparency as the independent variable, the credit risk as the dependent variable, the Sharia Supervisory Board as a moderating variable, and five control variables in the form of company size, leverage, efficiency, asset growth, and operating leverage. The sample used in the study amounted to 30 Islamic banks that have been registered with the OJK for the 2015-2019 period. The technique used in this research is multiple linear regression. Based on the research results, It was found that transparency had a negative effect on credit risk. Also, the results of this study indicate a role for the number of Sharia Supervisory Board meetings in strengthening the relationship between transparency and credit risk.

Keywords: *Transparency, Credit Risk, Sharia Supervisory Board, and Sharia Bank.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, melalui judul skripsi berupa **“Peran Dewan Pengawas Syariah, Transparansi, dan Risiko Kredit di Bank Syariah”**. Shalawat serta Salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar melalui Islam. Tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana di Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini berisi tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peran Dewan Pengawas Syariah, transparansi, dan risiko kredit di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari transparansi terhadap risiko kredit di bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara transparansi dan risiko kredit.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, masukan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh dan teladan yang baik bagi penulis.
3. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Arif Mustaqim dan Ibunda Ira Irawati, serta adik penulis, Aji Prasetyo Rahardjo yang senantiasa mengingatkan, memberikan dukungan, motivasi, perhatian, dan doa tiada henti kepada penulis.
4. Segenap keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis, terutama paman Ifan yang telah membantu penulis untuk mendapatkan buku-buku atau materi demi kelancaran proses penyusunan skripsi.
5. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Abdur Rafik, S.E., M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar, meluangkan waktunya, memberikan masukan, dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmunya selama penulis belajar di sini
9. Para sahabat selama di Yogyakarta: Desny Sekartanti Putri, Dinda Nuur Viranti, Noor Laili Budiarsih, Putri Wahyu Octaviani, dan Rimmah Muslimah. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan masukannya

selama ini, terutama untuk Putri dan Rimmah yang juga menjadi teman dalam bimbingan skripsi Pak Rafik .

10. Sahabat dan teman-teman lainnya: Sevila, Lu'lu, Tiwi, Anis, dan Gusniar yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Manajemen angkatan 2017, beserta para staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis menyadari keterbatasan yang dimiliki bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis menerima segala kritik serta saran yang membangun bagi penulis, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak pembaca.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan Skripsi.....	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi.....	v
Abstraksi	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	11
2.2 Risiko Kredit di Bank Syariah	13
2.3 Prinsip Tata Kelola Perusahaan pada Bank Syariah.....	16
2.4 Isu Transparansi pada Bank Syariah	20
2.5 Hubungan Transparansi dengan Risiko Kredit	23
2.6 Peran DPS dalam Pengelolaan Transparansi dan Risiko Kredit	26
2.7 Pengembangan Hipotesis	29
2.8 Model Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel.....	36
3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	38
3.4 Metode Analisis Data	40

3.4.1 Statistik Deskriptif	40
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	41
3.4.2.1 Uji Normalitas	41
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	41
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	42
3.4.2.4 Uji Autokorelasi	43
3.4.3 Uji Hipotesis	44
3.4.3.1 Analisis Linier Regresi Berganda	44
3.4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	46
3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	46
3.4.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	47
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Statistik Deskriptif.....	48
4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Transparansi	48
4.1.2 Statistik Variabel Dependen, Moderasi, dan Kontrol	51
4.2 Uji Asumsi Klasik	55
4.2.1 Uji Normalitas	55
4.2.2 Uji Multikolinearitas	56
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	57
4.2.4 Uji Autokorelasi	58
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis	59
4.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	60
4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	61
4.4 Pembahasan Hasil	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel.....	Halaman
3.1 Daftar Bank Syariah di Indonesia	35
4.1 Statistik Deskriptif Variabel Transparansi	48
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen, Moderasi, dan Kontrol	52
4.3 <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	56
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	57
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
4.6 Hasil Uji Autokorelasi	59
4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	60
4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	61
4.9 Hasil Uji Statistik (Uji T)	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model Penelitian	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Bank Syariah	79
2. Daftar Indeks Transparansi	80
3. Hasil Perhitungan NPL	85
4. Daftar Jumlah Dewan Pengawas Syariah	86
5. Daftar Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah	87
6. Hasil Perhitungan Transparansi*Jumlah DPS	88
7. Hasil Perhitungan Transparansi*Jumlah Rapat DPS	89
8. Hasil Perhitungan Ukuran Bank	90
9. Hasil Perhitungan <i>Leverage</i>	91
10. Hasil Perhitungan Efisiensi	92
11. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Aset	93
12. Hasil Perhitungan <i>Operating Leverage</i>	94
13. Hasil Statistik Deskriptif	95
14. Hasil Uji Asumsi Klasik	96
15. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola perusahaan merupakan bagian yang penting dalam setiap perusahaan. Banyak perusahaan konvensional maupun syariah yang bersaing untuk meningkatkan kualitas dari sistem tata kelola perusahaan mereka. Peraturan mengenai penerapan konsep tata kelola perusahaan diatur oleh Bank Indonesia. Hal ini bertujuan agar penerapan atau pelaksanaan konsep tata kelola perusahaan menjadi terstandarisasi, sehingga kualitas bank juga mengalami peningkatan.

Perusahaan yang menjalankan konsep tata kelola perusahaan dengan baik akan memperoleh predikat sebagai *Good Corporate Governance*. Menurut Hessel (2003), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebuah sistem dan struktur yang mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, serta mengalokasikan beberapa pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Perusahaan dapat dikatakan sebagai *Good Corporate Governance* apabila telah memenuhi lima prinsip, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, profesional, dan kewajaran. Selain menerapkan lima prinsip dalam GCG, bank syariah juga harus memastikan bahwa semua sistem operasional bank sesuai dengan nilai-nilai dalam agama Islam.

Meskipun peran kelima prinsip GCG dalam sebuah perusahaan penting, tetapi prinsip transparansi memiliki peran lebih besar di dalam bank syariah. Salah satu

contohnya adalah penggunaan prinsip transparansi dalam kontrak perjanjian bank. Hal ini dilakukan agar pihak nasabah dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan dananya secara terbuka. Menurut Healy dan Palepu (2001), transparansi perusahaan adalah salah satu elemen paling mendasar dari tata kelola perusahaan yang baik. Apabila sistem transparansi yang ada dalam bank berjalan dengan baik, maka kualitas ketersediaan informasinya juga semakin baik.

Selain itu, sistem transparansi sangat dibutuhkan oleh bank syariah untuk menjamin kualitas kontrak dan sistem pembagian hasil, seperti kontrak pada sistem musyarakah. Sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam musyarakah dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Praktik pengungkapan informasi digunakan untuk mengawasi dan mengontrol bagaimana proses pengelolaan dana secara bersama-sama.

Tinggi atau rendahnya kualitas pengungkapan informasi dapat memengaruhi kondisi bank di masa mendatang. Kualitas informasi yang rendah dapat menciptakan ketidakpastian yang lebih besar pada investasi, keputusan pinjaman yang menghasilkan eksposur risiko lebih besar, dan membuat banyak bank menjadi tidak stabil (Flanner dan Thokor, 2006). Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa praktik pengungkapan informasi dapat memengaruhi manajemen risiko pada bank. Hal ini dikarenakan semakin sedikit informasi yang diperoleh oleh *stakeholders*, maka semakin sulit pula untuk membuat keputusan terkait manajemen risikonya.

Para *stakeholders* membutuhkan banyak informasi dari bank untuk menganalisis dan membuat keputusan secara tepat terkait dengan risiko yang dihadapi oleh bank tersebut. Menurut Greuning dan Iqbal (2008), pengungkapan merupakan mekanisme yang efektif dalam mengekspos bank untuk disiplin pasar, menyajikan kualitas data, dan memungkinkan analisis risiko keuangan yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dapat membantu bank dalam membuat penanggulangan risiko keuangannya secara wajar atau tidak berlebihan.

Selain itu, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa praktik transparansi berhubungan dengan risiko kredit dalam sebuah bank. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Samir Srairi (2019). Ia mengungkapkan adanya hubungan antara transparansi dengan risiko kredit di bank-bank syariah. Bank yang mengungkapkan informasi lebih banyak, memiliki lebih sedikit tingkat kredit yang bermasalah (Srairi, 2019). Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa tingkat pengungkapan yang diatur dapat meningkatkan stabilitas bank melalui penguatan disiplin pasar.

Namun, tidak semua peneliti setuju bahwa transparansi dapat memberikan keuntungan bagi bank. Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi memiliki dampak negatif bagi kelangsungan bank. Pengungkapan dapat menyebabkan interpretasi dari informasi spesifik tentang kondisi keuangan bank sebagai indikator masalah luas dalam perbankan (Morris & Shin, 2002; Goldstein & Sapra, 2013). Selain itu, praktik pengungkapan informasi memerlukan biaya yang dapat merugikan sistem perbankan (Bushman, 2004). Adanya perbedaan hasil penelitian ini membuat sejumlah peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh transparansi terhadap risiko bank.

Risiko dalam bank dapat memengaruhi kestabilan dari suatu bank. Bank yang stabil mencerminkan kemampuan mereka dalam pengelolaan risiko dengan lebih baik. Namun, untuk menjaga kondisi bank tetap stabil, maka dibutuhkan transparansi sebagai medianya. Selain itu, lembaga internasional, seperti *Basel Committee on Banking Supervision* juga menjelaskan bahwa tingkat transparansi dapat berkontribusi besar terhadap stabilitas perbankan di suatu negara.

Di negara-negara Islam, bank syariah telah mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan bagi muslim untuk dapat bertransaksi dan menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Walaupun industri bank syariah belum sebesar industri bank konvensional, tetapi sudah banyak negara-negara dengan mayoritas penduduknya Islam yang berfokus untuk mengembangkan bank syariah di negara mereka, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, perkembangan bank syariah masih terus mengalami pertumbuhan. Banyak bank yang pada awalnya hanya beroperasi secara konvensional, kini ikut mendirikan bank dengan prinsip syariah. Dalam sistem operasionalnya, bank-bank tersebut harus membuat pengelolaan dana yang berbeda dengan sistem pada bank konvensional. Oleh karena itu, pihak bank biasanya akan memberikan pelatihan kepada para staffnya untuk mempelajari mekanisme dari bank syariah.

Walaupun kehadiran bank syariah dalam industri perbankan Indonesia belum selama bank konvensional, tetapi bank syariah juga menghadapi risiko yang sama dengan bank konvensional. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Bank Umum Syariah wajib menerapkan manajemen risiko untuk meminimalkan empat jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Oleh karena itu, bank syariah harus memperhatikan keempat risiko tersebut agar tetap terjaga kestabilan kinerjanya.

Dari keempat macam risiko yang dihadapi oleh bank, risiko kredit dianggap memiliki kontribusi besar yang dapat memengaruhi kestabilan bank. Menurut *Bank for International Settlements* (2000), risiko kredit adalah sumber utama dari ketidakstabilan keuangan di sektor perbankan. Risiko ini berasal dari pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya pada kreditur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam bank syariah, risiko kredit bisa berasal dari model pembayaran atau akad (perjanjian), seperti *Murabahah* dan *Ba'i al Salam*.

Para peneliti biasanya menggunakan NPL sebagai indikator utama untuk mengukur risiko kredit dalam bank. Menurut Sozer (2010), NPL mencerminkan kualitas aset bank, solvabilitas, dan sektor riil. Krisis keuangan telah menunjukkan bahwa kenaikan rasio dalam NPL menunjukkan adanya masalah dalam ekonomi (Claessens, Klingebiel & Laeven, 2001). Hal tersebut menandakan bahwa tingkat NPL tidak hanya menggambarkan bagaimana keadaan

suatu bank saja, tetapi juga dapat menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian suatu negara.

Untuk memastikan agar prinsip transparansi dan pengelolaan risiko pada bank berjalan dengan baik, bank syariah memerlukan pengawasan tambahan melalui peran Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dibentuk untuk mengawasi kepatuhan terhadap syariah, memastikan konsistensi dengan hukum syariah dan untuk memberi nasihat kepada dewan direksi tentang masalah syariah (Malim, 2015). Ukuran dan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam setahun biasanya digunakan dalam penelitian untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dari Dewan Pengawas Syariah terhadap bank syariah.

Pada umumnya, jumlah penelitian di Indonesia yang terkait dengan bank syariah masih belum sebanyak penelitian dengan bank konvensional. Hal ini masih dianggap wajar mengingat pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang masih belum sebesar negara-negara Islam lainnya, seperti Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, dan Malaysia. Namun, dalam konteks tata kelola perusahaan sudah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan pada bank syariah di Indonesia, walaupun jumlahnya masih terbatas. Beberapa di antaranya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yudhistira Ardana (2019), Fathan Budiman (2016), serta Dewany (2015). Ketiga jurnal tersebut sama-sama mengambil tema mengenai tata kelola perusahaan dan risiko bank.

Meskipun di Indonesia sudah terdapat penelitian mengenai bank-bank syariah, tetapi belum ada pembahasan yang benar-benar fokus pada aspek transparansi terhadap risiko kredit di bank syariah. Padahal, jumlah bank syariah yang ada di Indonesia sudah cukup banyak. Bank syariah membutuhkan sistem transparansi yang besar untuk menjamin agar prinsip syariahnya dapat berjalan dengan baik di dalam sistem bank. Konsep transparansi juga menjadi lebih penting bagi bank syariah karena sistem operasional mereka menggunakan prinsip *Profit Loss Sharing* (Arifin et al., 2009).

Penelitian mengenai transparansi penting untuk dilakukan karena di antara kelima prinsip tata kelola perusahaan, prinsip transparansi memiliki peran yang penting dalam sistem bank. Transparansi digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kebijakan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah (Nurkhin & Rohman, 2020). Transparansi juga dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para *stakeholders*, termasuk keputusan dalam pengelolaan risiko kredit bank.

Selain itu, penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap hubungan antara transparansi dan risiko kredit masih jarang ditemukan di Indonesia. Penelitian mengenai keterkaitan antara transparansi dengan risiko kredit juga masih harus ditingkatkan mengingat masih terbatasnya sumber mengenai topik tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai transparansi terhadap risiko kredit dengan turut melibatkan peran Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah bank-bank syariah di Indonesia sudah menerapkan sistem transparansinya dengan baik, sehingga dapat mengelola risiko kredit secara tepat berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh bank. Tujuan lain yang ingin diraih oleh penulis, yaitu membuktikan apakah Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara transparansi dengan risiko kredit di bank syariah. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menambah literatur mengenai bagaimana sistem transparansi diterapkan pada bank-bank syariah di Indonesia, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang lebih baik untuk membantu penelitian-penelitian berikutnya.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam konteks penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tingkat transparansi memengaruhi risiko kredit pada bank syariah?
2. Apakah jumlah Dewan Pengawas Syariah memoderasi pengaruh transparansi terhadap risiko kredit di bank syariah?
3. Apakah jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah memoderasi transparansi terhadap risiko kredit di bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, seperti:

1. Menguji pengaruh transparansi terhadap risiko kredit pada bank syariah.
2. Menguji pengaruh moderasi dari peran jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap hubungan antara transparansi dengan risiko kredit di bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Dilihat dari aspek kontribusi teoritis, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu memperkaya pengetahuan tentang bagaimana sistem transparansi yang ada di Indonesia, khususnya pada bank-bank syariah, serta untuk mengetahui bagaimana peran transparansi dapat memengaruhi pengelolaan risiko kredit pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini berfungsi pula untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara transparansi dengan risiko kredit yang dimoderasikan oleh Dewan Pengawas Syariah.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Dilihat dari aspek kontribusi praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh pihak bank syariah untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengungkapan informasi atau praktik transparansi kepada para *stakeholders*, termasuk Dewan Pengawas Syariah agar dapat memudahkan pekerjaan mereka. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh bank syariah untuk mengelola risiko kredit di perusahaannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Awal mula pendirian bank syariah dilatarbelakangi oleh adanya gerakan *renaissance* Islam modern. Pada saat itu, kaum muslimin berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang dilandasi oleh etika agar kehidupan perekonomian mereka dapat berjalan sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan sistem *profit* dan *loss sharing* dalam aktivitas bisnisnya. Kedua sistem tersebut pertama kali digunakan pada tahun 1940 di Pakistan dan Malaysia untuk menghimpun serta mengelola dana dari jamaah haji secara non-konvensional. Sejak saat itu bank syariah mulai tumbuh dan berkembang ke negara-negara lainnya, termasuk Indonesia.

Saat ini keberadaan bank-bank syariah di Indonesia sudah semakin banyak. Bank syariah pertama kali didirikan dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990. Walaupun bank syariah baru muncul di Indonesia pada tahun 1990, tetapi rencana mengenai keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan islam di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1980-an. Beberapa tokoh yang ikut berpartisipasi dalam diskusi mengenai pendirian bank syariah di Indonesia adalah M. Amien Azis, Karnaen A. Perwataatmadja, A. M. Saefuddin, dan M. Dawam Rahardjo. Mereka mendirikan *Baitut Tamwil-Salman* di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti sebagai upaya untuk menerapkan prinsip ekonomi islam di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian, MUI mulai

berencana untuk membentuk kelompok kerja agar dapat mendirikan bank syariah dengan menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Bogor, Jawa Barat pada Agustus tahun 1990. Setelah pembentukan kelompok kerja tersebut, tim perbankan MUI berhasil mendirikan bank syariah pertama di Indonesia yang disebut dengan Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan sudah memiliki banyak cabang yang tersebar di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan masih banyak lagi. Sebelumnya, sistem operasional Bank Muamalat Indonesia hanya menggunakan landasan hukum yang disebut dengan sistem bagi hasil karena belum ada Undang-Undang resmi yang mengatur sistem operasional bank syariah. Hal ini dikarenakan keberadaan bank syariah yang masih baru dalam industri perbankan Indonesia, sehingga masih belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah.

Namun seiring berjalannya waktu, industri bank syariah mulai mendapat perhatian dari pemerintah pada era reformasi yang ditandai dengan adanya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Isi dari Undang-Undang tersebut mengatur landasan hukum dan penjelasan mengenai jenis-jenis usaha apa saja yang diperbolehkan dalam bank syariah. Pengesahan UU No.10 Tahun 1998 memiliki pengaruh yang baik terhadap jumlah bank syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya arahan atau himbuan kepada bank - bank konvensional untuk mendirikan cabang syariahnya. Pendirian bank syariah juga dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, sehingga kebutuhan akan

hadirnya produk-produk bertema “syariah” memiliki nilai tambahan bagi umat muslim. Namun, kebutuhan tersebut belum terpenuhi secara optimal karena keberadaan bank syariah di Indonesia masih sedikit. Oleh karena itu, banyak bank konvensional yang berniat untuk membuka cabang syariahnya dengan memberikan pelatihan kepada pegawainya mengenai sistem perbankan syariah.

Pendirian cabang syariah pada bank-bank konvensional juga dikarenakan adanya potensial pasar yang besar dalam industri perbankan. Salah satu bank konvensional yang ikut mendirikan cabang syariahnya adalah Bank Mandiri dengan nama Bank Syariah Mandiri. Bank tersebut merupakan bank milik pemerintah Indonesia yang menjadi pelopor dalam penggunaan sistem perbankan syariah bagi bank-bank konvensional lainnya. Selain Bank Syariah Mandiri, terdapat pula bank-bank konvensional lainnya yang ikut mendirikan unit syariahnya, seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Bukopin, Bank BTN, dan Bank Mega. Terdapat pula bank milik pemerintah daerah yang turut mendirikan cabang syariahnya, yaitu BJB, Bank Jateng, Bank Aceh, dan lain-lain. Pendirian bank-bank tersebut membuat jumlah bank syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah bank syariah yang telah beroperasi dan terdaftar dalam OJK sampai dengan tahun 2019, yaitu 199 bank yang terdiri dari 14 Bank Umum, 20 Unit Usaha Syariah, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.2 Risiko Kredit di Bank Syariah

Keberadaan bank syariah masih dianggap sebagai pemain baru dalam industri perbankan Indonesia. Walaupun jumlah bank syariah tidak sebanyak bank

konvensional, tetapi risiko yang dihadapi oleh bank syariah sama dengan bank konvensional. Pernyataan ini sesuai dengan lampiran yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Bank Umum Syariah wajib menerapkan manajemen risiko untuk meminimalkan empat jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Dari keempat macam risiko yang dihadapi oleh bank, risiko kredit dianggap memiliki kontribusi besar yang dapat memengaruhi kestabilan bank. Menurut *Bank for International Settlements* (2000), risiko kredit adalah sumber utama dari ketidakstabilan keuangan di sektor perbankan. Risiko ini berasal dari pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya pada kreditur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Risiko kredit timbul dari kegagalan pengusaha untuk mengganti saham yang disepakati dengan bank secara tepat waktu dalam model pembagian keuntungan, seperti tanah dan investasi (Incekara & Cetinkaya, 2019). Risiko kredit dapat menjadi sumber masalah bagi sebuah bank, karena pembayaran kredit yang macet dapat mengganggu kestabilan, memengaruhi profitabilitas, serta menimbulkan krisis pada bank.

Secara umum, ada beberapa penyebab mengapa sebuah bank dapat mengalami risiko kredit. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, risiko kredit disebabkan oleh pihak bank yang memberikan kredit pada debitur, menempatkan dana pada bank lain sebagai penempatan antar bank, melakukan transaksi derivatif, dan membeli surat berharga korporasi. Namun, risiko kredit pada bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional.

Pada bank konvensional, risiko kredit berasal dari pihak debitur yang tidak mampu membayar sejumlah hutang dan bunga yang telah ditetapkan oleh bank. Sementara dalam bank syariah, praktik bunga dilarang untuk dilakukan, sehingga risiko kredit berasal dari jenis pembayaran, seperti *Murabahah* dan *Ba'i al Salam*. Pada akad *Murabahah*, risiko disebabkan oleh pihak peminjam yang tidak mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu pada saat pihak bank sudah menyerahkan barang terlebih dahulu. Sementara risiko kredit pada *Ba'i al Salam* terjadi apabila peminjam tidak bisa memberikan barang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diminta, namun pihak bank sudah membayarkan atau melakukan pembelian terlebih dahulu kepada pihak peminjam. Hal ini jelas menjadi kerugian tersendiri bagi pihak bank karena telah mengeluarkan modal atau melakukan pembiayaan kepada pihak peminjam tanpa menerima aset atau uang tunai terlebih dahulu, dan terkadang terdapat pula peminjam yang terlambat untuk mengembalikan kembali dana kepada bank.

Akad atau perjanjian seperti itulah yang membuat risiko kredit pada bank syariah menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi kinerja dan tingkat pendapatan yang akan diterima oleh bank syariah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed (2002) terhadap 28 negara mengenai manajemen risiko kredit di lembaga keuangan islam menunjukkan bahwa bank syariah memiliki hutang dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki batasan dan metode tersendiri yang digunakan untuk mengelola risiko kredit tanpa mengabaikan prinsip syariahnya.

Bank biasanya menilai risiko kreditnya dengan cara memperhatikan tingkat NPL (*Non Performing Loan*). Menurut Sozer (2010), total kredit NPL dapat mencerminkan kualitas aset bank, solvabilitas, dan sektor riil. Semakin tinggi nilai NPL, maka semakin besar pula risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank, sehingga memengaruhi keuntungan yang akan didapatkan oleh bank. NPL yang tinggi juga mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam bank. Sebuah pinjaman dapat dikategorikan menjadi NPL apabila pembayaran hutang pokok dan bunga telah memasuki jatuh tempo 90 hari atau lebih.

2.3 Prinsip Tata Kelola Perusahaan pada Perbankan Syariah

Prinsip tata kelola perusahaan selalu menjadi topik pembahasan yang penting di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perusahaan sering memastikan kegiatan bisnisnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan memiliki citra yang baik di masyarakat dan mendapatkan predikat *Good Corporate Governance*. Menurut Hessel (2003), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem dan struktur yang mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, serta mengalokasikan beberapa pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Dengan demikian, peran GCG tidak hanya penting untuk pihak internal saja, tetapi juga untuk pihak-pihak luar perusahaan.

Prinsip tata kelola perusahaan dalam bank syariah umumnya sama dengan bank-bank konvensional yang terdiri dari lima prinsip, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, profesional, dan kewajaran. Penjelasan mengenai kelima prinsip dalam tata kelola perusahaan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi berisi tentang bagaimana bank memberikan informasi secara terbuka mengenai sistem operasional perusahaan dan proses pengambilan keputusan mereka kepada para *stakeholders*. Dalam prinsip ini, bank syariah dapat memberikan informasi mengenai sumber modal, sistem pembagian keuntungan, sistem penyaluran dana kepada masyarakat, jenis produk perbankan yang ditawarkan, dan masih banyak lagi.
2. Prinsip akuntabilitas menjelaskan bagaimana kejelasan fungsi, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dari perusahaan. Bank syariah harus bisa memastikan sistem pengelolaannya dapat berjalan secara efektif sesuai dengan fungsi yang sudah dibuat.
3. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) membahas sistem yang terdapat pada perusahaan apakah sudah sesuai atau belum dengan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan kriteria-kriteria dalam pengelolaan bank yang sehat.

4. Prinsip profesional merupakan prinsip di mana bank syariah berkomitmen untuk tidak terpengaruh oleh pihak lain. Selain itu, prinsip ini juga menjelaskan bagaimana bank mengembangkan kecakapan serta kompetensi dari para staffnya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
5. Prinsip kewajaran adalah prinsip yang berfungsi sebagai dasar bagi bank syariah untuk dapat bersikap adil atau setara kepada seluruh para *stakeholders*.

Namun, perbankan syariah tidak hanya memastikan bahwa sistem tata kelola perusahaan mereka sesuai dengan kelima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi harus disesuaikan pula dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma dari para ulama. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan yang dilakukan oleh bank tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan dan syariah dilakukan secara bersamaan untuk meminimalkan risiko reputasi bagi bank syariah dan menjamin kehalalan dari produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan pada bank syariah dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Hal ini dibuktikan melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan di berbagai negara islam. Salah satu contohnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Grassa dan Matoussi (2014) terhadap 77 bank islam besar di daerah GCC dan negara-negara Asia Selatan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh

signifikan pada kinerja keuangan bank syariah. Hasil serupa juga ditemukan oleh beberapa peneliti, seperti Wang et.al (2012) di Amerika Serikat, Faisal et.al (2016) di Pakistan, serta Wasiuzzaman dan Gunasegavan (2013) di Malaysia, yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh tata kelola perusahaan terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja bank juga pernah dilakukan di Indonesia. Menurut Kusuma dan Ayumardani (2016), struktur tata kelola perusahaan merupakan komponen penting yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pada bank syariah di Indonesia.

Untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan berjalan dengan baik di bank syariah, pemerintah harus ikut berperan sebagai fasilitator. Salah satu caranya melalui peraturan yang telah dibuat oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia mengenai penerapan *Good Corporate Governance* bagi industri perbankan syariah. Pada tahun 2009, Bank Indonesia membuat peraturan nomor 11/33/PBI/2009 mengenai penerapan GCG bagi bank-bank syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Bank Sentral Indonesia (SEBI) nomor 12/13/DPBS/2010 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terakhir, Bank Indonesia juga membuat peraturan lain mengenai penerapan GCG di bawah bank umum melalui peraturan nomor 6/24/PBI/2014. Semua peraturan tersebut dibuat dengan harapan agar pelaksanaan tata kelola perusahaan pada bank syariah di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan terstandarisasi.

2.4 Isu Transparansi pada Bank Syariah

Penerapan transparansi dalam sebuah bank bertujuan untuk menjamin adanya ketersediaan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga bank dapat mengelola risikonya dengan baik. Transparansi biasanya digunakan oleh *stakeholders* untuk masalah pengambilan keputusan, implementasi dan pemantauan terhadap kinerja bank saat ini. Ketersediaan informasi ini berguna untuk meminimalkan asimetri informasi antara orang dalam dan orang luar, serta memungkinkan investor untuk menilai kinerja perusahaan (Cheung, Jiang, & Tan, 2010). Oleh karena itu, praktik pengungkapan informasi secara terbuka (transparansi) membuat para *stakeholders* mendapatkan kualitas informasi yang lebih baik dan membuat keputusan investasi yang tepat di masa depan.

Transparansi didefinisikan oleh para peserta PBB sebagai akses informasi yang tepat dan dapat diandalkan untuk keputusan dan kinerja sektor publik (Armstrong, 2005). Hal serupa juga dinyatakan oleh Kondo (2002) yang menjelaskan bahwa transparansi dibutuhkan oleh semua pihak, termasuk publik. Transparansi berfungsi sebagai kegiatan politik dan administrasi, di mana informasi yang andal dan tepat waktu diberikan kepada publik (Kondo, 2002). Dari pemaparan tersebut jelas bahwa pihak eksternal membutuhkan informasi untuk kepentingannya. Pihak eksternal mengharapkan adanya kualitas informasi yang baik dan penyampaian informasi secara tepat waktu oleh perusahaan kepada publik.

Menurut Borgia (2005), transparansi pada perusahaan dapat ditingkatkan melalui akuntansi, pelaporan keuangan, serta pelaporan non-keuangan. Hasil

penelitian Borgia juga memaparkan adanya tiga karakteristik perusahaan yang telah menjalankan prinsip transparansi, seperti:

1. Budaya perusahaan yang mengutamakan transparansi, di mulai dari manajemen puncak yang ada dalam perusahaan.
2. Proses penghargaan dan hukuman untuk sistem transparansi yang telah dijalankan, sehingga dapat mendorong pelaksanaan transparansi di setiap level perusahaan.
3. Komunikasi yang efektif dapat terjalin di antara semua karyawan dan pemangku kepentingan yang disediakan oleh manajemen.

Bank-bank syariah harus memperhatikan masalah transparansi dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini dikarenakan transparansi dapat menggambarkan bagaimana proses, sistem dan kegiatan yang ada di bank secara jelas. Selain itu, transparansi menjadi penting bagi bank syariah karena semua perjanjian yang dibuat harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga pihak nasabah dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan dananya secara terbuka. Tidak hanya penting bagi nasabah, transparansi juga penting untuk membantu Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya agar semua sistem yang ada dalam bank tetap sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditentukan.

Transparansi pada bank syariah berguna pula untuk pembagian keuntungan dan kerugian (*Profit Loss Sharing/PLS*) antara pihak bank dengan nasabah. Bank syariah memiliki berbagai macam kontrak atau produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Setiap kontrak tersebut pasti memiliki mekanisme pembagian keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Menurut Lahrech (2014), ketika

bank syariah mengoperasikan dananya melalui fasilitas PLS, bank wajib menyetujui rasio bagi hasil yang sesuai dengan pedoman syariah. Pihak bank harus membagi adil keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari setiap transaksi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Khaldi dan Hamdouni (2018). Hukum ekuitas syariah menyatakan pentingnya pembagian keuntungan dan kerugian yang adil dan merata antara deposan dan bank, terlepas dari apapun bentuk pembiayaan yang digunakan (Khaldi & Hamdouni, 2018). Oleh karena itu, adanya peningkatan praktik transparansi sangat dibutuhkan dalam bank syariah untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank, termasuk mekanisme dalam proses transaksi dapat dipertanggungjawabkan.

Tingkat pengungkapan informasi yang telah diatur dengan baik dapat meningkatkan stabilitas bank melalui penguatan disiplin pasar (Srairi, 2019). Hal ini menunjukkan transparansi dapat memengaruhi tingkat kestabilan dalam bank. Pernyataan tersebut didukung pula Alexandre, Bouaiss, dan Refait-Alexandre (2010). Peraturan pengungkapan mengurangi masalah agensi, meningkatkan kepercayaan deposan dalam sistem perbankan, dan meningkatkan stabilitas dan daya saing pasar perbankan (Alexandre, Bouaiss, dan Refait-Alexandre, 2010).

Namun, keberadaan transparansi juga dapat menjadi dilema tersendiri bagi sebuah bank. Menurut Borgia (2005), transparansi berada di persimpangan antara 'hak untuk tahu' bagi publik dan 'hak atas privasi' bagi bisnis. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi bisa diberikan kepada publik untuk menjaga hak privasi bisnis. Selain itu, terdapat pula beberapa penelitian yang menemukan bahwa pengungkapan atau transparansi dapat memberikan dampak negatif bagi

keberlangsungan bank. Pengungkapan informasi dapat menyebabkan interpretasi dari informasi spesifik tentang kondisi keuangan bank, sehingga menjadi indikator permasalahan dalam bank (Morris & Shin, 2002; Goldstein & Sapra, 2013). Selain itu, perusahaan juga membutuhkan biaya khusus untuk melakukan praktik transparansi. Menurut Bushman (2004), keterbukaan informasi memerlukan biaya yang dapat merugikan sistem perbankan. Oleh karena itu, meskipun transparansi bermanfaat bagi suatu bank, tetapi bank harus tetap berhati-hati dalam mengungkapkan sejauh mana informasi tersebut akan diberikan kepada publik dan pihak lainnya agar tidak membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan bank.

2.5 Hubungan Transparansi dengan Risiko Kredit

Sebuah risiko dapat dikelola dengan baik oleh bank apabila informasi yang dimiliki oleh bank cukup lengkap dan akurat. Peningkatan kualitas informasi dalam bank dapat dilakukan dengan memperbaiki kekurangan dari sistem transparansi yang sudah diterapkan sebelumnya. Kualitas informasi yang baik membuat bank lebih mudah untuk membuat keputusan yang terkait dengan pengendalian dan pencegahan risiko. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Flannery dan Thakor (2006). Kualitas informasi yang rendah dapat menciptakan ketidakpastian yang lebih besar pada investasi, keputusan pinjaman yang menghasilkan eksposur risiko lebih besar, dan membuat banyak bank menjadi tidak stabil (Flanner dan Thakor, 2006). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan sebuah informasi dapat berpengaruh terhadap kondisi kestabilan bank di mana informasi yang minim memungkinkan bank

untuk membuat keputusan yang kurang tepat, sehingga risiko yang dihadapi menjadi lebih besar.

Pengungkapan informasi atau transparansi juga dapat memengaruhi pengelolaan risiko dalam sebuah bank. Bank yang mengungkapkan informasi lebih banyak, memiliki lebih sedikit tingkat kredit yang bermasalah (Srairi, 2019). Menurut Greuning dan Iqbal (2008), pengungkapan merupakan mekanisme yang efektif dalam mengekspos bank untuk disiplin pasar, menyajikan kualitas data, dan memungkinkan analisis risiko keuangan yang wajar.

Analisis risiko secara wajar dapat membantu bank dalam menilai profil risiko mereka, sehingga bank dapat mengelola risikonya dengan baik, terutama risiko kredit. Risiko kredit dianggap sebagai risiko utama dalam sektor perbankan karena risiko tersebut berhubungan langsung dengan pendapatan yang akan diterima oleh bank. Pendapatan bank yang menurun akan berpengaruh pada nilai perusahaan, sehingga berdampak pula terhadap keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemegang saham. Apabila bank tidak transparan, maka *stakeholders* akan kesulitan dalam membuat keputusan, ketidakpastian menjadi besar, dan terjadi penurunan tingkat kepercayaan pada bank.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), regulasi pengungkapan dapat dicapai dengan cara menciptakan persyaratan pengungkapan minimum dan mengurangi kesenjangan informasi antara agen informasi. Hal ini membuat sistem transparansi bermanfaat dalam pengungkapan informasi keuangan bagi semua pihak, termasuk investor dan pelaku pasar lainnya agar dapat menilai profil dari risiko bank secara akurat. Transparansi juga membantu *stakeholders* dalam mempertimbangkan

informasi yang tersedia di pasar. Menurut Greuning dan Iqbal (2008), transparansi tidak dapat mencegah krisis keuangan, tetapi dapat memoderasi respon partisipan pasar terhadap berita buruk dengan membantu mereka mengantisipasi dan menilai informasi yang negatif. Ini berarti transparansi secara tidak langsung membantu *stakeholders* membuat keputusan dengan cepat ketika ada informasi negatif mengenai bank.

Semua sistem yang ada dalam bank harus dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, terutama pengelolaan dalam risiko kredit agar dapat meningkatkan kinerja dan memaksimalkan keuntungan. Sistem transparansi dan pengelolaan risiko kredit yang baik dapat menjaga kinerja dan stabilitas pada bank syariah. Tingkat kestabilan sebuah bank dapat dilihat melalui bagaimana kondisi perusahaan dan keuangannya setiap tahun. Bank yang stabil cenderung menunjukkan performa kinerja yang baik melalui peningkatan laba yang dihasilkannya. Sistem transparansi dapat meningkatkan stabilitas bank melalui keputusan pengambilan risiko bank. Jika sebuah bank mengambil keputusan mengenai risikonya secara berlebihan, maka akan timbul kemungkinan bahwa bank tersebut akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk hal-hal yang mungkin kurang diperlukan. Selain itu, adanya peningkatan transparansi dapat memfasilitasi alokasi sumber daya berupa peningkatan dalam disiplin pasar melalui mengurangi asimetri informasi (Tadesse, 2006).

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Ahmad (2004), bank syariah harus memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan pengungkapan informasi yang memadai mengenai pembiayaan aset dan risiko

yang harus dihadapi. Hal ini bertujuan agar bank dapat mengelola risikonya dengan lebih baik, sehingga kinerja bank juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, bank-bank syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko kreditnya dengan tidak berlebihan dalam memberikan pinjaman di sektor-sektor yang berisiko dan menjalankan praktik pengungkapan informasi secara optimal di seluruh aspek kegiatan bank.

2.6 Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengelolaan Transparansi dan Risiko Kredit

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah berperan penting untuk memastikan prinsip transparansi dan pengelolaan risiko pada bank syariah dapat berjalan dengan baik. Dewan Pengawas Syariah dibentuk untuk mengawasi kepatuhan terhadap syariah, memastikan konsistensi dengan hukum syariah dan untuk memberi nasihat kepada dewan direksi tentang masalah syariah (Malim, 2015). Selain itu, DPS juga dapat memberikan nasihat dan membagikan pengetahuan mereka kepada dewan dan manajemen senior untuk memastikan dan menjaga bahwa semua kegiatan operasional yang ada dalam bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, kinerja dari Dewan Pengawas Syariah tersebut akan diawasi dan dinilai langsung oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, kehadiran kedua lembaga tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan semua sistem berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga membutuhkan transparansi dari semua pihak untuk menunjang tugas mereka.

Menurut Wijethunga, Ekanayake & Toufik (2015), Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari para cendekiawan yang memiliki pengalaman di bidang syariah,

serta individu yang memiliki keahlian di bidang perbankan dan jasa keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar mereka dapat menghasilkan keputusan yang tepat bagi bank syariah. Kemampuan dari anggota Dewan Pengawas Syariah juga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan perbankan, sehingga turut meningkatkan kinerja dari bank syariah. Oleh karena itu, pemilihan dalam menentukan anggota Dewan Pengawas Syariah membutuhkan pertimbangan yang matang karena pemilihan tersebut akan berpengaruh terhadap bank syariah.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam menjaga semua aktivitas yang ada dalam bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal tata kelola bank. Tata kelola pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena adanya fondasi etis dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (Hayat dan Malik, 2014). Hal ini menandakan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi kunci penting dalam kegiatan bank syariah.

Hasil penelitian serupa juga ditunjukkan oleh Hasan et.al (2017) dan Nomran (2018). Dewan Pengawas Syariah merupakan tulang punggung dari bank syariah dan berfungsi sebagai lapisan tata kelola tambahan (Hassan et.al, 2017). Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dalam industri perbankan syariah (Nomran & Haron, 2017). Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting di dalam sistem tata kelola bank syariah.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang terkait dengan transparansi adalah memastikan ketersediaan informasi

tentang sistem operasional bank agar terhindar dari praktik riba. Bank syariah harus memastikan dan melaporkan kepada Dewan Pengawas Syariah bahwa semua kegiatannya terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Bank memiliki tanggung jawab kepada Dewan Pengawas Syariah untuk menghilangkan bunga, gharar, perjudian, risiko tinggi dalam transaksi, dan secara signifikan memantau operasi untuk mematuhi syariah hukum (Nomran, Haron, Hassan, 2017).

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah membutuhkan informasi dari berbagai pihak secara transparan untuk memberikan nasehat atau masukan yang tepat kepada *Chief Risk Officer* (CRO) dalam mengelola risiko, termasuk masalah pengelolaan risiko kredit dalam bank syariah. Hal ini secara tidak langsung membuat kegiatan pengawasan risiko dalam bank syariah dilakukan pula oleh Dewan Pengawas Syariah. CRO dan DPS juga dapat mengekang keputusan risiko yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Abedifar, Molyneux, dan Tarazi (2013), bank syariah menghadapi risiko tambahan karena adanya kompleksitas dalam model keuangan Islam, sehingga bank syariah membutuhkan pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS terhadap operasional bisnisnya, termasuk dalam pengelolaan risiko kreditnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Alman (2012). Hasil penelitian Alman menunjukkan ukuran dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang syariah berpengaruh positif terhadap risiko portofolio pinjaman pada bank syariah.

Adanya peran Dewan Pengawas Syariah di dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan sistem yang dapat

membantu bank syariah dalam menjaga aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa peneliti, seperti Elamer, Ntim, dan Abdou (2020) serta Neifar dan Jarboui (2018) menemukan adanya hubungan positif antara Dewan Pengawas Syariah dengan pengungkapan risiko. Namun, di sisi lain terdapat pula hasil penelitian berbeda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dengan praktik pengungkapan risiko, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Saufanny dan Khomsatun (2017).

Dalam Islam, pengungkapan merupakan hal yang penting (Maali et al., 2006). Pengungkapan informasi atau transparansi dibutuhkan di semua sistem bank, termasuk dalam hal risiko. Pengungkapan risiko dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para *stakeholders*, salah satunya Dewan Pengawas Syariah. Informasi dan pendapat dari Dewan Pengawas Syariah menjadi penting bagi keberlangsungan bank syariah. Hal tersebut berfungsi untuk menjaga citra dan kepatuhan dari bank syariah. Dewan Pengawas Syariah dapat berperan sebagai fungsi dari manajemen pengawasan dan audit yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip - prinsip syariah (Nurkhin & Rohman, 2020).

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Transparansi dan Risiko Kredit

Dalam sebuah penelitian, transparansi dapat memengaruhi disiplin pasar. Menurut Wang et al. (2005), semakin banyak informasi yang diungkapkan ke publik, maka semakin kuat disiplin pasar. Disiplin pasar adalah reaksi para pelaku

pasar terhadap risiko yang diambil oleh bank sebagai bentuk pengawasan dan pendisiplinan. Adanya disiplin pasar akan membuat bank lebih bijak dan tidak berlebihan dalam mengambil tindakan untuk manajemen risikonya. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara sistem transparansi dengan kondisi finansial suatu bank. Hal ini telah dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bourgain, Pieretti, dan Zanaj (2012) mengenai hubungan antara pengungkapan, keterbukaan, dan pengambilan risiko dari 258 bank di wilayah MENA, di mana tingkat keterbukaan finansial yang tinggi sangat diperlukan untuk hubungan positif antara transparansi keuangan dan manajemen risiko yang aman.

Transparansi di dalam bank syariah memiliki peran yang besar karena bank syariah memerlukan informasi mengenai bagaimana aturan dan ketentuan dalam pembagian keuntungan untuk disampaikan kepada para *stakeholders* (Ariffin et al., 2009). Selain itu, pengungkapan informasi juga penting karena adanya perbedaan dalam karakteristik kontrak dan produk dari perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Menurut Grassa (2020), kontrak dari perbankan syariah dibangun atas dasar hubungan kemitraan di mana bank akan menawarkan produk perbankan tanpa bisa meminta jaminan kepada si peminjam dana, sehingga bank syariah tidak dapat menghindari risiko kreditnya. Hal tersebut tentu berbeda dengan bank konvensional di mana mereka akan menerapkan sistem bunga dan meminta jaminan apabila si peminjam tidak dapat membayar hutangnya. Oleh karena itu, bank syariah memerlukan informasi yang lebih banyak mengenai kualitas dari pihak yang akan menjadi mitra mereka dan dasar dari aktivitas bisnis

yang akan dijalankan. Informasi tersebut juga berguna untuk mengetahui seberapa besar risiko kredit yang akan ditanggung oleh bank.

Peringkat kredit dalam bank biasanya dilakukan oleh *Credit Rating Agencies* (CRA). Namun, dalam melaksanakan pekerjaannya, pihak CRA membutuhkan informasi mengenai pengungkapan risiko untuk mempermudah dalam menilai peringkat kredit sebuah bank. Proses pemeringkatan tersebut melibatkan dua jenis informasi, yaitu informasi publik dan informasi privat, di mana kedua informasi tersebut akan disatukan dan dibangun di atas perkiraan arus kas masa depan untuk menilai kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya (Standard dan Poor's, 2009).

Apabila bank mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai risikonya, maka bank akan memiliki peringkat kredit yang lebih baik pula. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elamer's (2017). Hasil penelitian tersebut menemukan adanya hubungan positif antara pengungkapan risiko dan peringkat kredit bank. Masih dalam penelitian yang sama, Elamer's juga menunjukkan bahwa bank yang mengungkapkan risiko dengan lebih baik dapat meminimalkan asimetri informasi dan memberikan sinyal kepada pasar mengenai kualitas dan prospek bank di masa mendatang.

Penelitian lain yang juga mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif antara pengungkapan risiko dengan peringkat kredit bank adalah studi yang dilakukan oleh Skaife et.al (2006); Aman dan Nguyen (2013); Kuang dan Qin (2013); Grassa et.al (2020). Peringkat kredit yang tinggi menunjukkan pengelolaan risiko di suatu bank dalam keadaan bagus, sehingga jumlah kredit

yang bermasalah juga menjadi lebih sedikit. Peringkat kredit yang lebih tinggi juga dapat membuat bank lebih termotivasi untuk mengungkapkan informasi risiko pada laporan tahunannya.

Bagi bank syariah, pengungkapan dapat menjadi instrumen atau alat yang efektif untuk memantau dan mengendalikan risiko dalam bank. Praktik pengungkapan informasi juga dapat menjadi perantara untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak lain. Dalam sistem keuangan islam, hubungan kepercayaan sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak di mana mereka akan sama-sama membagi keuntungan dan kerugian dalam setiap perjanjian. Meskipun bank telah membagi eksposur kerugiannya dengan pihak lain, tetapi bank tidak bisa menghilangkan seluruh risiko kreditnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalkan risikonya adalah melakukan pengungkapan informasi secara akurat untuk mengurangi asimetri informasi dengan berbagai pihak, sehingga bank dapat menghasilkan keputusan yang tepat.

Praktik pengungkapan informasi atau transparansi yang dilakukan oleh bank syariah dapat berpengaruh terhadap jumlah kredit macet pada bank tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Srairi (2019), di mana transparansi berkorelasi negatif signifikan terhadap risiko kredit. Dengan demikian, hipotesis yang dibuat dalam penelitian sebagai berikut:

H₁: Transparansi berpengaruh negatif terhadap risiko kredit

2.7.2 Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Transparansi dan Risiko Kredit

Dewan Pengawas Syariah secara tidak langsung memainkan peran penting dalam penerapan tata kelola perusahaan. Dewan Pengawas Syariah harus memastikan semua produk, layanan dan sistem operasional dalam bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa tanggung jawab, seperti memberi nasihat kepada dewan direksi, memberikan masukan kepada IFI (*Islamic Finance Institution*) agar perusahaan dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah, menetapkan aturan dan prinsip syariah, mengawasi kepatuhan, dan mengeluarkan fatwa untuk menciptakan kepercayaan yang berhubungan dengan kepatuhan syariah (Safieddine, 2009).

Adanya peran DPS yang membantu bank syariah dalam menjalankan fungsi transparansi dan pengelolaan risiko kredit diperkuat oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bourakba dan Zerargui (2015) yang meneliti hubungan antara risiko kredit dan tata kelola perusahaan pada 12 bank syariah di Timur Tengah. Hasil dalam penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran dari Dewan Pengawas Syariah yang lebih besar dapat mengurangi risiko kredit pada bank syariah. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa peran pemantauan oleh DPS secara efektif dapat mengurangi pengambilan risiko dalam bank syariah.

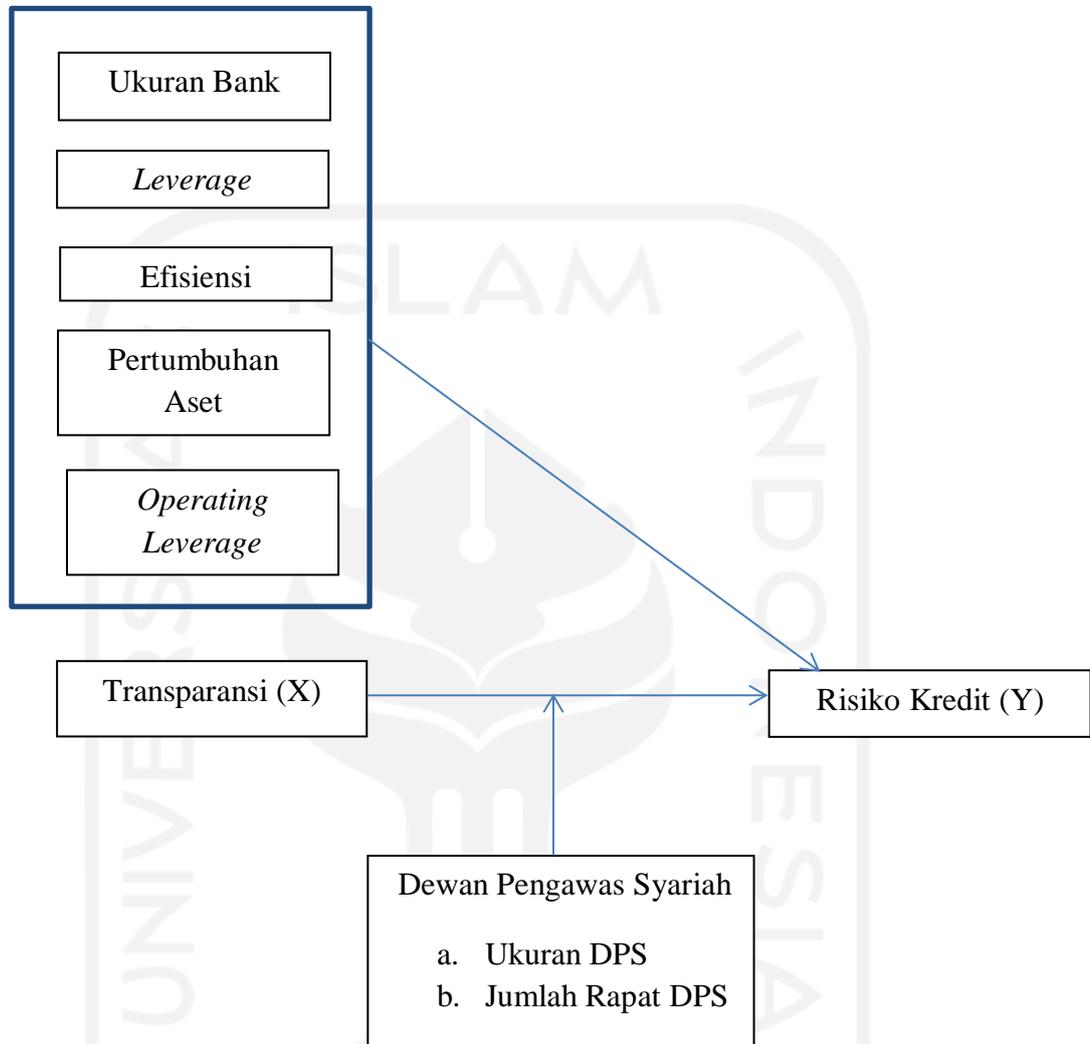
H_{2a}: Ukuran Dewan Pengawas Syariah memperkuat pengaruh transparansi terhadap risiko kredit.

Selain melalui ukuran, Dewan Pengawas Syariah dapat membuat bank syariah menjalankan tata kelola perusahaannya dengan lebih baik melalui intensitas rapat yang diadakan setiap tahunnya. Semakin sering Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat, maka kesempatan untuk berbagi dan mendapatkan informasi juga menjadi lebih besar. Menurut Chariri (2019), kinerja Dewan Pengawas Syariah yang diukur melalui jumlah rapat anggota dalam setahun dapat memengaruhi risiko kredit pada bank syariah.

Apabila Dewan Pengawas Syariah lebih sering mengadakan rapat, maka pengawasan terhadap praktik pengungkapan informasi juga semakin mudah, sehingga memudahkan bank syariah juga dalam mengendalikan risiko kreditnya. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga merupakan hal yang penting dalam bank syariah karena keberadaan mereka dapat memengaruhi kegiatan operasional bank dan kinerja keuangan (Chariri, 2019). Dengan demikian, hipotesis kedua yang terdapat dalam penelitian, yaitu:

H_{2b}: Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah memperkuat pengaruh transparansi terhadap risiko kredit.

2.8 Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang terlibat dalam penelitian ini adalah semua bank syariah yang ada di Indonesia dan sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik yang termasuk ke dalam bank umum maupun unit usaha syariah. Namun, jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 30 bank, terdiri dari 14 bank umum dan 16 unit usaha syariah. Penelitian ini juga akan menggunakan *non-probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling (judgement sampling)* agar dapat memenuhi kebutuhan penelitian dan mendapatkan hasil terbaik. Kriteria yang digunakan dalam teknik purposive sampling ini, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut dengan periode tahun 2015-2019. Nama bank-bank syariah yang termasuk dalam sampel dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Daftar Bank-Bank Syariah di Indonesia

No	Nama Bank Syariah	Jenis Bank
1	PT. Bank Aceh Syariah.	Bank Umum
2	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah.	Bank Umum
3	PT. Bank Muamalat Indonesia.	Bank Umum
4	PT. Bank Victoria Syariah.	Bank Umum
5	PT. Bank BRISyariah.	Bank Umum
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah.	Bank Umum
7	PT. Bank BNI Syariah.	Bank Umum
8	PT. Bank Syariah Mandiri.	Bank Umum

No	Nama Bank Syariah	Jenis Bank
9	PT. Bank Mega Syariah.	Bank Umum
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah.	Bank Umum
11	PT. Bank Syariah Bukopin.	Bank Umum
12	PT. BCA Syariah.	Bank Umum
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Syariah.	Bank Umum
14	PT. Maybank Syariah Indonesia.	Bank Umum
15	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.	Unit Usaha Syariah
16	PT. Bank Permata, Tbk.	Unit Usaha Syariah
17	PT. BPD Kalimantan Barat.	Unit Usaha Syariah
18	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	Unit Usaha Syariah
19	PT. BPD Kalimantan Selatan.	Unit Usaha Syariah
20	PT. Bank Sinarmas.	Unit Usaha Syariah
21	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	Unit Usaha Syariah
22	PT. BPD DKI.	Unit Usaha Syariah
23	PT. BPD Kalimantan Timur.	Unit Usaha Syariah
24	PT. BPD Jawa Tengah.	Unit Usaha Syariah
25	PT. BPD Jawa Timur, Tbk.	Unit Usaha Syariah
26	PT. BPD Sumatera Utara.	Unit Usaha Syariah
27	PT. BPD Jambi.	Unit Usaha Syariah
28	PT. BPD Sumatera Barat.	Unit Usaha Syariah
29	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau.	Unit Usaha Syariah
30	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.	Unit Usaha Syariah

Sumber: OJK, 2019

3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari sumber sekunder, yaitu data dari laporan tahunan pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia dan sudah terdaftar dalam OJK. Laporan-laporan tersebut didapatkan melalui situs *www.idx.co.id* dan website dari masing-masing bank syariah. Laporan tahunan yang dipakai dalam penelitian memiliki rentang waktu 5 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 1 variabel *dependent* (risiko kredit), 1 variabel *independent* (transparansi), 1 variabel moderasi (Dewan Pengawas Syariah), serta 5 variabel kontrol yang merupakan variabel spesifik bank (ukuran bank, *leverage*, efisiensi, pertumbuhan aset, dan *operating leverage*). Penjelasan berupa definisi serta rincian pengukuran dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko atau kerugian yang berasal dari debitur atau pihak peminjam yang tidak mampu membayarkan kewajibannya, baik utang pokok maupun bunganya. Menurut Bank Indonesia, risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Risiko ini bersumber dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh bank, seperti aktivitas perkreditan dan aktivitas *treasury*. Risiko kredit pada bank dapat diukur menggunakan jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Non Lancar}}{\text{Total Kredit}}$$

2. Transparansi

Pengungkapan transparansi perusahaan adalah proses di mana informasi mengenai perusahaan dapat diungkapkan serta diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan publik. Transparansi diukur menggunakan CTDI (*Corporate Transparency Disclosure Index*) yang terdiri dari 5 unsur, yaitu pengungkapan informasi perusahaan sebanyak 22 item, keterbukaan

informasi keuangan/finansial berjumlah 30 item, pengungkapan umum tata kelola perusahaan sebanyak 12 item, keterbukaan tata kelola syariah berjumlah 7 item, dan pengungkapan manajemen risiko sebanyak 32 item. Jadi secara keseluruhan ada 103 item yang digunakan untuk mengukur variabel transparansi dan secara rinci telah disebutkan di dalam Lampiran 2. Kemudian, transparansi/CTDI diukur melalui rumus sebagai berikut:

$$CTDI_j = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij} \times 100}{n_j}$$

Keterangan:

CTDI : Indeks pengungkapan transparansi perusahaan.

J : Nama bank.

X_i : Nilainya bervariasi antara 0 dan 1

N : Jumlah total item.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah sekelompok orang yang memiliki pengetahuan di bidang syariah, perbankan dan jasa keuangan. Pengukuran untuk variabel ini menggunakan dua cara, yaitu jumlah DPS dalam bank syariah dan intensitas pertemuan DPS dalam setahun.

4. Variabel Kontrol

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, variabel kontrol yang dilibatkan dalam penelitian adalah variabel spesifik bank yang terdiri dari 5 macam variabel, yaitu ukuran bank, *leverage*, efisiensi, pertumbuhan

aset, dan *operating leverage*. Variabel kontrol digunakan untuk menunjukkan variasi yang ada dalam risiko bank. Penjelasan mengenai bagaimana cara pengukuran dari masing-masing kelima variabel kontrol dipaparkan sebagai berikut:

- Ukuran bank = Logaritma dari total aset perbankan.
- *Leverage* = Pemegang rekening investasi dibagi dengan total aset.
- Efisiensi = Rasio biaya terhadap pendapatan.
- Pertumbuhan aset = (Aset tahun ini – Aset tahun kemarin) : Aset tahun kemarin.
- *Operating leverage* = Aktiva tetap : total aset.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data ada 3 jenis, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Pengujian ketiga metode tersebut melibatkan bantuan aplikasi SPSS Statistics 17.0.

3.4.1 Analisis Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan uji yang berisi pemaparan dari hasil jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Dalam konteks penelitian ini, penulis memaparkan hasil dari analisis statistik deskriptif mengenai transparansi sebagai variabel independen, risiko kredit sebagai variabel dependen, Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel moderasi, dan lima variabel kontrol yang

digunakan dalam penelitian, seperti ukuran bank, tingkat *leverage*, efisiensi, pertumbuhan aset, dan *operating leverage*.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tujuan penggunaan uji asumsi klasik adalah memastikan kesesuaian antara data yang akan digunakan dengan asumsi dasar.

1. Uji Normalitas

Pada umumnya uji normalitas digunakan sebelum melakukan analisis statistik. Penggunaan uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam pengamatan terdistribusi secara normal atau tidak. Perhitungan uji normalitas dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Menurut Ghozali (2016), data dikatakan normal apabila *p-value* memiliki nilai lebih besar dari 0,05 dan dianggap tidak normal apabila *p-value* lebih kecil dari 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas atau ketergantungan linier dekat merupakan fenomena statistik yang muncul ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi yang saling berkorelasi (Daoud, J. I., 2017). Terdapat beberapa tanda yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendiagnostik multikolinieritas. Kriteria yang dapat digunakan oleh peneliti dalam

menentukan uji multikolinearitas, yaitu melalui faktor inflasi varian (*Variance Inflation Factors/VIF*). VIF merupakan alat yang digunakan dalam mengukur besarnya peningkatan varian. VIF dapat dihitung melalui perangkat lunak khusus di bidang analisis regresi. Menurut Daoud (2017), ada beberapa kategori dalam menafsirkan penilaian dalam VIF, yaitu:

- $VIF = 1$, memiliki arti bahwa tidak ada korelasi.
- $1 < VIF \leq 5$, memiliki arti bahwa tingkat korelasi sedang.
- $VIF > 5$, memiliki arti bahwa tingkat korelasi tinggi.

Selain itu, kriteria lain yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak dengan melihat nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance* $> 10\%$, maka tidak ada korelasi antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari pengamatan dalam model regresi. Terdapat berbagai macam uji yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi mengalami atau tidak gejala heteroskedastisitas, seperti uji *Park*, Uji *White*, Uji *Breusch Pagan Godfrey (BPG)*, atau dengan menggunakan *scatterplot*. Dari keempat model tersebut, penulis akan menggunakan Uji *White* dalam pengujian heteroskedastisitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Menurut Ghozali (2013), Uji *White* dilakukan melalui regresi residual kuadrat (U^2) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian variabel independen. Berikut beberapa langkah untuk melakukan Uji *White*:

- Mencari nilai residual untuk menemukan nilai dari *R Square*.
- Setelah nilai *R Square* diketahui, cari nilai *Chi Square* hitung melalui rumus: $n \times$ nilai *R Square*, di mana n adalah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian.
- Mencari nilai *Chi Square table* melalui rumus $df = k - 1$, di mana k adalah jumlah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian.
- Kriteria keputusan:
 - a. Jika nilai hitung *Chi Square* $<$ nilai *Chi Square table*, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.
 - b. Jika hitung nilai *Chi Square* $>$ nilai *Chi Square table*, maka ada masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi kesalahan pengganggu di periode saat ini dengan periode sebelumnya dalam model regresi. Uji ini dapat dilakukan apabila sampel yang digunakan menggunakan data *time series* atau runtut waktu. Penulis menggunakan metode *Durbin-Watson* untuk mengetahui hasil dari uji autokorelasi. Taraf signifikan yang digunakan dalam uji *Durbin-Watson*,

yaitu sebesar 5% atau 0,05. Menurut Setyowati (2016), ada tiga kriteria keputusan dalam metode *Durbin-Watson*, yaitu:

- Nilai DW < -2, memiliki arti bahwa ada korelasi positif.
- Nilai DW antara -2 sampai +2, memiliki arti bahwa tidak ada korelasi.
- Nilai DW > +2, memiliki arti bahwa ada korelasi negatif.

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Analisis Linier Regresi Berganda

Penulis melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi. Jenis regresi yang akan digunakan dalam penelitian adalah model regresi linear berganda. Hasil dari uji regresi linear berganda akan menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh di antara variabel dependen (variabel Y) dengan variabel independen (variabel X). Semua variabel yang akan digunakan menjadi sampel di dalam sebuah penelitian bersifat kuantitatif dan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0.05. Dalam konteks penelitian ini, terdapat tiga jenis model yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Model pertama dibuat untuk mengetahui apakah variabel Dewan Pengawas Syariah (Z) dapat memoderasi hubungan di antara variabel transparansi (X) dengan variabel risiko kredit (Y). Bentuk persamaan model regresi pertama dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{RISK} = \alpha + \beta_1 \text{TRANS} + \beta_2 \text{DPS}_1 + \beta_3 \text{DPS}_2 + \beta_4 \text{TRANS} * \text{DPS}_1 + \beta_5 \text{TRANS} * \text{DPS}_2 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan persamaan 1, diketahui bahwa variabel RISK adalah risiko kredit, variabel TRANS adalah transparansi, variabel DPS_1 adalah jumlah DPS dalam bank syariah, variabel DPS_2 adalah jumlah rapat DPS setiap tahun, variabel $TRANS * DPS_1$ adalah transparansi dikali dengan jumlah DPS, variabel $TRANS * DPS_2$ adalah transparansi dikali dengan jumlah rapat DPS, dan ϵ adalah *prediction error*.

Model regresi kedua memiliki tujuan untuk melihat pengaruh transparansi terhadap risiko kredit. Namun, terdapat variabel lain yang diikutsertakan dalam model regresi kedua, yaitu variabel moderasi dan variabel kontrol. Bentuk persamaan yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{RISK} = & \alpha + \beta_1 \text{TRANS} + \beta_2 \text{DPS}_1 + \beta_3 \text{DPS}_2 + \beta_4 \text{TRANS} * \text{DPS}_1 + \\ & \beta_5 \text{TRANS} * \text{DPS}_2 + \beta_6 \text{SIZE} + \beta_7 \text{LEVERAGE} + \beta_8 \text{EFFICIENCY} + \\ & \beta_9 \text{GROWTH} + \beta_{10} \text{OP.LEVERAGE} + \epsilon \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan 2, diketahui bahwa variabel RISK adalah risiko kredit, variabel TRANS adalah transparansi, variabel DPS_1 adalah jumlah DPS dalam bank syariah, variabel DPS_2 adalah jumlah rapat DPS setiap tahun, variabel $TRANS * DPS_1$ adalah transparansi dikali dengan jumlah DPS, variabel $TRANS * DPS_2$ adalah transparansi dikali dengan jumlah rapat DPS. Selain itu, terdapat pula lima variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian, seperti variabel *SIZE* berupa ukuran bank, variabel *LEVERAGE*, variabel *EFFICIENCY*, variabel *GROWTH* adalah pertumbuhan aset, variabel *OP.LEVERAGE* berupa *operating leverage*, dan ϵ adalah *prediction error*.

Model regresi ketiga bertujuan untuk melihat pengaruh dari kelima unsur yang ada di dalam transparansi terhadap risiko kredit. Bentuk persamaan regresi ketiga dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{RISK} = \alpha + \beta_1\text{GI} + \beta_2\text{FI} + \beta_3\text{CG} + \beta_4\text{SG} + \beta_5\text{RM} + \epsilon \dots\dots\dots(3)$$

Berdasarkan persamaan 3, diketahui bahwa variabel RISK adalah risiko kredit, variabel GI adalah informasi umum, variabel FI adalah informasi keuangan, variabel CG adalah tata kelola perusahaan, variabel SG adalah keterbukaan tata kelola syariah, variabel RM adalah manajemen risiko, serta ϵ adalah *prediction error*.

3.4.3.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah model untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai koefisien determinasi dapat digunakan apabila model yang diuji dalam penelitian telah memenuhi syarat di dalam uji simultan atau uji F. Hasil dari pengujian ini dapat menunjukkan seberapa besar pengaruh dari variabel independen yang digunakan dalam model terhadap variabel dependennya.

3.4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen dengan variabel dependen secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan 3 jenis model yang akan diuji secara simultan untuk melihat

bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen. Besarnya nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian adalah 5%.

3.4.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen yang digunakan dalam suatu model terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk melihat secara parsial bagaimana pengaruh dari variabel transparansi, variabel Dewan Pengawas Syariah, dan variabel kontrol (ukuran bank, *leverage*, efisiensi, pertumbuhan aset & *operating leverage*) terhadap variabel risiko kredit. Nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebesar 5%.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Transparansi

Penulis melakukan uji statistik deskriptif variabel transparansi dari 30 sampel bank syariah yang digunakan dalam penelitian dengan rentang waktu tahun 2015-2019, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian secara keseluruhan terdiri dari 150. Pengujian transparansi terdiri dari lima komponen, yaitu informasi umum, informasi keuangan, tata kelola perusahaan, keterbukaan tata kelola syariah, dan manajemen risiko. Hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel transparansi ditampilkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Variabel Transparansi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Informasi Umum	150	77	95	92.75	2.956
Informasi Keuangan	150	63	87	75.61	5.761
Tata Kelola Perusahaan	150	42	100	88.03	7.837
Keterbukaan Tata Kelola Syariah	150	29	100	85.07	18.864
Manajemen Risiko	150	53	84	70.72	6.861
Keseluruhan CDTI	150	63	87	79.93	4.952
Valid N (listwise)	150				

Sumber: data diolah IBM SPSS 17, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.1 dapat diketahui hasil uji statistik deskriptif dari sampel bank syariah yang digunakan dalam penelitian. Variabel informasi umum memiliki nilai minimum sebesar 77 dan nilai maksimum sebesar 95. Nilai rata-rata dari informasi umum selama periode 2015-2019 sebesar 92.75 yang menandakan bahwa rata-rata bank memaparkan isi dari informasi umum di dalam laporan tahunannya secara lengkap. Nilai rata-rata dari variabel informasi umum juga memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan variabel transparansi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih lengkap memaparkan informasi umum mereka dibandingkan dengan keempat variabel transparansi lainnya. Nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 2.956. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menandakan bahwa simpangan data dari variabel informasi umum adalah rendah.

Variabel informasi keuangan memiliki nilai minimum sebesar 63 dan nilai maksimum sebesar 87. Nilai rata-rata dari variabel informasi keuangan sebesar 75.61. Hal ini menunjukkan bahwa informasi keuangan yang diungkapkan oleh bank syariah ke publik cukup lengkap. Sedangkan nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 5.761. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menandakan bahwa simpangan data dari variabel informasi umum adalah rendah.

Variabel tata kelola perusahaan mempunyai nilai minimum sebesar 42 dan nilai maksimum sebesar 100 di mana nilai maksimum tersebut menandakan adanya bank syariah yang mengungkapkan informasi mengenai tata kelola perusahaannya sangat lengkap, yaitu memenuhi 12 unsur yang digunakan dalam

variabel tata kelola perusahaan. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 88.03 dan nilai standar deviasi sebesar 7.837. Simpangan data dari variabel tata kelola perusahaan adalah rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Variabel keterbukaan tata kelola syariah mempunyai nilai minimum sebesar 29 di mana nilai tersebut menunjukkan adanya bank syariah (bank umum/unit usaha syariah) yang hanya sedikit memberikan informasi mengenai unsur syariah yang diujikan dalam penelitian. Nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 100 di mana nilai ini menandakan adanya bank syariah yang mengungkapkan informasi mengenai tata kelola syariah secara lengkap, yaitu meliputi 7 unsur yang digunakan dalam variabel keterbukaan tata kelola syariah. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 85.07 dan nilai standar deviasi sebesar 18.864. Simpangan data dari variabel keterbukaan tata kelola syariah adalah rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Variabel manajemen risiko terdiri dari 32 unsur penelitian. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel manajemen risiko mempunyai nilai minimum sebesar 53 dan nilai maksimum sebesar 84. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 70.72 dan nilai standar deviasi sebesar 6.861. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menandakan bahwa simpangan data dari variabel manajemen risiko adalah rendah.

Variabel keseluruhan CTDI terdiri dari 103 unsur yang diperoleh dari gabungan unsur-unsur sebelumnya di dalam transparansi (22 unsur informasi keuangan, 30 unsur informasi keuangan, 12 unsur tata kelola perusahaan, 7 unsur

keterbukaan tata kelola syariah, dan 32 unsur manajemen risiko). Nilai minimum dari variabel ini adalah 63 dan nilai maksimum sebesar 87. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 79.93 dan nilai standar deviasi sebesar 4.952. Simpangan data dari variabel keseluruhan CTDI adalah rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

4.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen, Moderasi, dan Kontrol

Uji statistik deskriptif variabel dependen, moderasi, dan kontrol terdiri dari 150 sampel yang diperoleh melalui 30 sampel bank syariah di Indonesia dengan rentang waktu selama 5 tahun (2015-2019). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah risiko kredit dengan NPL sebagai pengukurannya. Variabel moderasi yang dimasukkan ke dalam model penelitian adalah DPS yang terdiri dari variabel jumlah anggota DPS dan intensitas rapat DPS dalam setahun, sedangkan variabel kontrol terdiri dari 5 unsur, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, efisiensi, pertumbuhan aset, dan *operating leverage*. Hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel dependen, moderasi, dan kontrol ditampilkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif Variabel Dependen, Moderasi, dan Kontrol

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	150	.00	12.46	1.9581	2.15083
Jumlah Anggota DPS	150	1	3	2.39	.504
Jumlah Rapat DPS	150	0	36	12.00	7.381
Ukuran Bank <i>Leverage</i>	150	12.420	18.537	15.63634	1.294409
Efisiensi	150	.012	1.163	.45628	.210305
Pertumbuhan Aset	150	-14.223	58.450	3.11794	6.489376
<i>Operating Leverage</i>	150	-.219	1.431	.17995	.238779
Valid N (listwise)	150	.000	.062	.01192	.014266

Sumber: data diolah IBM SPSS 17, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui hasil uji statistik deskriptif mengenai variabel dependen, variabel moderasi, dan variabel kontrol dari sampel bank syariah yang digunakan di dalam penelitian. Variabel NPL mempunyai nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maksimum sebesar 12.46. Nilai minimum mencerminkan tingkat NPL yang rendah dalam bank, sehingga keadaan bank dapat dikatakan stabil, sedangkan nilai maksimum menunjukkan adanya jumlah kredit macet yang tinggi dan kondisi bank yang kurang stabil. Nilai rata-rata dari variabel NPL sebesar 1.9581 dan nilai standar deviasi sebesar 2.15083. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tingkat simpangan data yang relatif tinggi.

Variabel jumlah anggota DPS memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3. Nilai rata – rata dari variabel jumlah anggota DPS sebesar 2.39 atau dapat dibulatkan menjadi 2, yang menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia rata-rata memiliki 2 anggota Dewan Pengawas Syariah. Nilai standar deviasi yang diperoleh dalam perhitungan sebesar 0.504. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tingkat simpangan data yang relatif rendah.

Variabel jumlah rapat DPS memiliki nilai minimum sebesar 0. Hal ini menandakan adanya bank yang tidak memperlihatkan seberapa banyak frekuensi pertemuan rapat anggota DPS mereka dalam setahun. Nilai maksimum yang diperoleh sebesar 36. Nilai rata-rata dari variabel jumlah rapat DPS sebesar 12, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa intensitas rapat DPS baik karena telah mengadakan rapat setidaknya 1 kali dalam sebulan, sehingga terdapat 12 kali rapat dalam setahun. Nilai standar deviasi yang diperoleh dalam perhitungan sebesar 7.381. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tingkat simpangan data yang relatif rendah.

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 12.420 dan nilai maksimum sebesar 18.537. Nilai rata-rata dari variabel ukuran perusahaan sebesar 15.63634 dan nilai standar deviasi sebesar 1.294409. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tingkat simpangan data yang relatif rendah.

Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,012 dan nilai maksimum sebesar 1,163. Nilai rata-rata dari variabel *leverage* sebesar 0.45628 dan nilai standar deviasi sebesar 0.210305. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tingkat simpangan data yang relatif rendah.

Variabel efisiensi memiliki nilai minimum sebesar -14.223 dan nilai maksimum sebesar 58.450. Nilai minimum pada efisiensi bernilai negatif menandakan bahwa adanya bank yang mengalami kerugian di tahun tertentu. Hal ini dikarenakan jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada jumlah pemasukan yang didapatkan oleh bank, sehingga membuat bank mengalami kerugian dan tidak efisien. Nilai rata-rata dari variabel efisiensi sebesar 3.11794 dan nilai standar deviasi sebesar 6.489376. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tingkat simpangan data yang relatif tinggi.

Variabel pertumbuhan aset memiliki nilai minimum sebesar -0.219 dan nilai maksimum sebesar 1.431. Nilai rata-rata dari variabel pertumbuhan aset sebesar 0.17995 dan nilai standar deviasi sebesar 0.238779. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tingkat simpangan data yang relatif tinggi.

Variabel *operating leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 0.062. Nilai rata-rata dari variabel *operating leverage* sebesar 0.01192 dan nilai standar deviasi sebesar 0.014266. Nilai standar deviasi yang

lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tingkat simpangan data yang relatif tinggi.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berfungsi untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian bermasalah atau tidak. Data dikatakan bermasalah apabila tidak memenuhi kriteria dari masing-masing pengujian yang digunakan dalam uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 4 jenis uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* ditunjukkan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.69181121
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		1.247
Asymp. Sig. (2-tailed)		.089

Sumber: data diolah IBM SPSS 17, 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 4.3, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.089. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat sig. 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi dengan normal dan layak untuk digunakan.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi di antara variabel independen dalam model regresi. Berikut hasil pengujian multikolinearitas yang ditunjukkan dalam tabel 4.4:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Kriteria	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Transparansi	Nilai <i>tolerance</i> > 10% dan VIF < 10	0,811	1,233	Tidak ada multikolinearitas
Ukuran Bank		0,904	1,106	
<i>Leverage</i>		0,966	1,035	
Efisiensi		0,846	1,183	
Pertumbuhan Aset		0,878	1,139	
<i>Operating Leverage</i>		0,754	1,326	

Sumber: data diolah IBM SPSS 17, 2021

Berdasarkan hasil yang telah ditunjukkan dalam tabel 4.4, maka dapat diketahui bahwa semua nilai VIF pada variabel independen telah memenuhi kriteria uji multikolinearitas di mana nilai VIF pada variabel transparansi sebesar 1.233, variabel ukuran bank sebesar 1.106, variabel *leverage* sebesar 1.035, variabel efisiensi sebesar 1.183, variabel pertumbuhan aset sebesar 1.139, dan variabel *operating leverage* sebesar 1.326. Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam pengujian memiliki nilai lebih dari 10%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang terdapat dalam penelitian tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan pada *variance*. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk melihat apakah terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model, yaitu Uji *White*. Seperti yang sudah dipaparkan dalam bab 3, langkah pertama untuk melakukan Uji *White* adalah mencari nilai residual untuk mengetahui nilai *R Square*. Tabel 4.5

menunjukkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk mengetahui nilai dari *R Square* sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.225 ^a	.051	.011	11.09731

Sumber: data diolah IBM SPSS 17, 2021

Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0.051. Kemudian, nilai *R Square* tersebut dihitung dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu $150 \times 0.051 = 7.65$. Langkah selanjutnya, yaitu mencari nilai *Chi Square* tabel dengan $df = 5$ dan tingkat signifikansi sebesar 5%. Nilai yang diperoleh melalui *Chi Square table* sebesar 11,070. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hitung *Chi Square* < nilai *Chi Square table* ($7.65 < 11.070$), sehingga model yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan dalam model regresi untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan korelasi pada periode t terhadap periode sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 3, pengujian ini dapat dilakukan melalui uji *Durbin-Watson* (D-W) dengan kriteria nilai D-W berada di antara -2 sampai +2 agar model regresi tidak terjadi autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin-Watson* ditunjukkan dalam tabel 4.6

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.265 ^a	.070	.031	2.11674	2.085

Sumber: data diolah IBM SPSS 17, 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.085. Sesuai dengan kriteria yang telah dipaparkan oleh Setyowati, nilai D-W sebesar 2.085 telah memenuhi kriteria dalam pengujian, sehingga data yang digunakan di dalam penelitian tidak mengalami gejala autokorelasi karena nilai D-W berada di antara -2 sampai +2.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Penulis melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda dapat digunakan apabila terdapat dua atau lebih variabel independen di dalam suatu penelitian. Uji regresi dalam sebuah penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 17.

4.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian, hanya 2 dari 3 macam model yang telah memenuhi syarat secara simultan, yaitu model 1 dan model 2 dengan pengujian menggunakan NPL. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi yang tercantum dalam Tabel 4.7:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

	NPL	
	Model 1	Model 2
R Square	0.138	0.187
Adjusted R Square	0.108	0.128

Sumber: data diolah IBM SPSS 17, 2021

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa nilai R Square pada model 1 adalah 0.138 atau 13.8%. Hal ini menandakan bahwa variabel moderasi berupa Dewan Pengawas Syariah hanya mampu menjelaskan keterlibatan variabel dalam penelitian sebesar 13.8% dan sisanya sebesar 86.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Sementara itu, nilai R Square pada model 2 adalah 0.187 atau 18.7%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa besarnya variabel transparansi terhadap risiko kredit adalah 18.7% dan sisanya sebesar 81.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui secara simultan pengaruh dari variabel independen dengan variabel dependen. Dalam konteks ini, uji F bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh secara simultan variabel-variabel yang digunakan dalam 3 model regresi. Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

	NPL		
	Model 1	Model 2	Model 3
F	4.599	3.196	2.149
Sig.	0.001	0.001	0.063

Sumber: data diolah IBM SPSS 17, 2021

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai F dalam model 1 adalah 4.599 dengan signifikansi < 0.05 , yaitu sebesar 0.001. Nilai F dalam model 2 sebesar 3.196 dengan nilai sig. 0.001. Nilai F dalam model 3 memberikan hasil berupa nilai F sebesar 2.149 dengan sig. 0.063. Dari ketiga model tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai F dengan NPL dalam model 1 telah memenuhi syarat secara simultan karena nilai F Hitung $> F$ Tabel ($4.599 > 1.83$) dan sig. $0.001 < 0.05$, sehingga H2 diterima. Hal serupa juga terdapat pada hasil model 2 di mana model tersebut telah memenuhi syarat secara simultan karena nilai F Hitung $> F$ Tabel ($3.196 > 1.83$) dan sig. $0.001 < 0.05$, sehingga keputusannya adalah H1 diterima.

4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual Statistik (Uji T)

Uji statistik dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen yang digunakan dalam suatu model terhadap variabel dependen. Uji statistik juga dapat menunjukkan baik atau tidaknya model regresi yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Hasil pengujian uji statistik ditunjukkan dalam tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Statistik (Uji T)

Variabel	NPL (Y ₁)		
	Model 1	Model 2	Model 3
1. Pengungkapan Transparansi (X)	-0.373** (-1.983)	-0.408** (-2.158)	
- Informasi Umum			0.111 (1.480)
- Informasi Keuangan			-0.004 (-0.006)
- Tata Kelola Perusahaan			-0.076** (-2.841)
- Keterbukaan Tata Kelola Syariah			0.000 (-0.055)
- Manajemen Risiko			-0.003 (-0.110)
2. Jumlah DPS (Z1)	0.733 (0.135)	0.323 (0.059)	
3. Jumlah Rapat DPS (Z2)	-2.038** (-4.294)	-2.045** (-4.322)	
4. Transparansi*Jumlah DPS (X*Z1)	-0.004 (-0.061)	-0.001 (-0.016)	
5. Transparansi*Jumlah Rapat DPS (X*Z2)	0.025** (4.230)	0.025** (4.263)	
Variabel Spesifik Bank:			
6. Ukuran Bank		0.080 (0.559)	
7. Leverage		1.026 (1.254)	
8. Efisiensi		-0.023 (-0.812)	

Variabel	NPL (Y ₁)		
	Model 1	Model 2	Model 3
9. Pertumbuhan Aset		-1.015 (-1.359)	
10. Operating Leverage		12.777 (0.948)	

Sumber: data diolah IBM SPSS 17, 2021

Keterangan: ** signifikansi di level 5%

Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh beberapa hasil pengujian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada model 1 dalam tabel 4.9, unsur pengungkapan transparansi memiliki nilai koefisien sebesar -0.373 dengan nilai t sebesar -1.983 dan berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit karena tingkat signifikansi yang dihasilkan menunjukkan nilai < 0.05 , yaitu 0.049. Unsur jumlah DPS memperoleh nilai koefisien 0.733 dan nilai t sebesar 0.135. Unsur jumlah rapat DPS memiliki nilai koefisien sebesar -2.038 dengan nilai t sebesar -4.294 dan berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit karena tingkat signifikansi yang dihasilkan menunjukkan nilai < 0.05 , yaitu 0.000. Unsur transparansi*jumlah DPS memiliki nilai koefisien -0.004 dengan nilai t sebesar -0.061. Unsur transparansi*jumlah rapat DPS memiliki nilai koefisien sebesar 0.025 dengan nilai t sebesar 4.230 dan berpengaruh signifikan karena tingkat signifikansi yang dihasilkan menunjukkan nilai < 0.05 , yaitu 0.000.
- b. Berdasarkan pada model 2 dalam tabel 4.9, unsur pengungkapan transparansi memiliki nilai koefisien sebesar -0.408 dengan nilai t sebesar -2.158 dan berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit karena tingkat signifikansi yang dihasilkan menunjukkan nilai < 0.05 , yaitu 0.033. Unsur

jumlah DPS memperoleh nilai koefisien 0.323 dan nilai t sebesar 0.059. Unsur jumlah rapat DPS yang diuji dengan menggunakan NPL memiliki nilai koefisien sebesar -2.045 dengan nilai t sebesar -4.322 dan berpengaruh signifikan karena menghasilkan nilai signifikansi < 0.05 , yaitu 0.000. Unsur transparansi*jumlah DPS memiliki nilai koefisien -0.001 dengan nilai t sebesar -0.016. Unsur transparansi*jumlah rapat DPS memiliki nilai koefisien sebesar 0.025 dengan nilai t sebesar 4.263 dan berpengaruh signifikan karena menghasilkan nilai signifikansi < 0.05 , yaitu 0.000.

Unsur ukuran bank memiliki nilai koefisien 0.080 dan t sebesar 0.559. Unsur *leverage* memiliki nilai koefisien sebesar 1.026 dengan nilai t sebesar 1.254. Unsur efisiensi memiliki nilai koefisien -0.023 dan t sebesar -0.812. Unsur pertumbuhan aset memiliki nilai koefisien sebesar -1.015 dengan nilai t sebesar -1.359. Unsur *operating leverage* memiliki nilai koefisien 12.777 dan t sebesar 0.948.

- c. Berdasarkan pada model 3 dalam tabel 4.9, unsur informasi umum memiliki nilai koefisien sebesar 0.111 dengan nilai t sebesar 1.480. Unsur informasi keuangan memperoleh nilai koefisien -0.004 dan nilai t sebesar -0.006. Unsur tata kelola perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar -0.076 dengan nilai t sebesar -2.841 dan berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit karena tingkat signifikansi < 0.05 , yaitu 0.005. Unsur keterbukaan tata kelola syariah memiliki nilai koefisien 0.000 dengan nilai

t sebesar -0.055. Unsur manajemen risiko memperoleh nilai koefisien serta nilai t sebesar -0.003 dan -0.110.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Transparansi terhadap Risiko Kredit

Berdasarkan hasil penelitian, variabel transparansi memiliki nilai koefisien negatif, baik di dalam model 1 maupun model 2. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai transparansi, maka semakin rendah jumlah kredit yang macet dalam bank, sehingga risiko kredit bank juga menjadi rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima atau transparansi berpengaruh negatif terhadap risiko kredit.

Bank yang melakukan pengungkapan informasi lebih banyak menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dimiliki oleh para *stakeholders* juga semakin baik, sehingga pemantauan dan pengelolaan terhadap risiko kredit menjadi lebih mudah. Apabila pengelolaan risiko kredit dilaksanakan dengan baik, maka jumlah kredit yang bermasalah dalam bank syariah semakin sedikit. Rendahnya jumlah kredit yang macet membuat bank menjadi lebih stabil dan risiko kebangkrutannya juga menjadi rendah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Samir Srairi pada tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya korelasi negatif pada hubungan transparansi terhadap risiko kredit. Bank syariah dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi berhubungan dengan pengambilan risiko yang lebih rendah, tingkat NPL yang lebih sedikit, serta adanya peningkatan

tingkat stabilitas bank melalui disiplin pasar (Srairi, 2019). Hasil serupa ditunjukkan pula oleh NG dan Rusticus (2012), di mana bank dengan kualitas informasi rendah dapat menimbulkan jumlah kredit macet yang lebih besar.

Selain itu, penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dengan Morris & Shin (2002), Jayaraman & Kothari (2013), serta Dhouibi et.al (2016). Menurut Jayaraman dan Kothari (2013), negara-negara yang memiliki bank dengan tingkat transparansi lebih besar berkaitan dengan risiko bank yang lebih besar pula. Hasil berbeda ditunjukkan pula oleh Dhouibi et.al (2002), di mana transparansi di bidang informasi keuangan tidak berpengaruh terhadap risiko bank.

4.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengaruh Transparansi terhadap Risiko Kredit

Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan antara transparansi dengan risiko kredit. Besar atau kecilnya jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak menjamin tingkat transparansi pada bank syariah. Sebagai contoh, bank syariah yang memiliki lebih sedikit anggota Dewan Pengawas Syariah bisa saja memiliki tingkat transparansi yang lebih besar dibandingkan dengan bank yang memiliki lebih banyak anggota Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, H_{2a} tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil penelitian ini serupa dengan Herawati, Rawi & Destiana (2019), di mana ukuran Dewan tidak memengaruhi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan Bourakba dan Zerargui (2015), di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran dari Dewan

Pengawas Syariah yang lebih besar dapat mengurangi risiko kredit pada bank syariah.

4.4.3 Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengaruh Transparansi terhadap Risiko Kredit

Variabel Transparansi*Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai koefisien positif, baik di dalam model 1 maupun model 2. Kenaikan pada jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dapat memperkuat tingkat transparansi yang ada di dalam bank syariah. Penguatan ini dikarenakan Dewan Pengawas Syariah akan sering mengadakan rapat dan bertukar informasi, sehingga ketersediaan informasi antar anggota juga menjadi semakin banyak. Selain itu, kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan di dalam bank syariah juga akan meningkat. Namun, nilai positif pada variabel ini memiliki arti yang berbeda jika dikaitkan dengan risiko kredit, dimana nilai tersebut menandakan bahwa jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menurunkan risiko kredit di bank syariah.

Hasil penelitian ini selaras dengan lain hasil penelitian yang ditemukan oleh Mollah dan Zaman (2015), serta Broquet (2012) yang menunjukkan adanya peran Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai tata kelola internal yang bertujuan untuk transparansi dalam pengungkapan informasi. Adanya Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian yang harus ada di dalam bank syariah untuk membantu bank agar sistem

transparansi dan ketersediaan informasi tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, H_{2b} dapat dibuktikan kebenarannya.

4.4.4 Pengaruh Indeks Transparansi terhadap Risiko Kredit

Indeks transparansi terdiri dari lima unsur, yaitu informasi umum, informasi keuangan, tata kelola perusahaan, keterbukaan tata kelola syariah, dan manajemen risiko. Berdasarkan hasil pengujian, variabel informasi umum, informasi keuangan, keterbukaan tata kelola syariah, dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap risiko kredit di bank syariah. Sementara variabel tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap risiko kredit. Hal ini menunjukkan bahwa dari kelima unsur transparansi yang digunakan untuk menguji risiko kredit, unsur tata kelola perusahaan yang memiliki pengaruh langsung terhadap risiko kredit di bank. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bourakba dan Zerargui (2015), di mana tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap risiko kredit. Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Switzer dan Wang (2013) yang menunjukkan bahwa aspek tata kelola perusahaan berperan dalam menurunkan tingkat risiko kredit di bank.

4.4.5 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Risiko Kredit

Variabel kontrol yang diikutsertakan ke dalam penelitian tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, efisiensi, pertumbuhan aset, dan *operating leverage* tidak berpengaruh terhadap risiko kredit. Hal ini memiliki arti bahwa nilai kecil atau besar yang diperoleh dari variabel kontrol tidak akan

memengaruhi risiko kredit bank. Sebagai contoh, bisa saja perusahaan kecil memiliki risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Srairi (2019), Bitar et al. (2016), dan John, Litov & Yeung (2008). Menurut Srairi (2019), ukuran bank berpengaruh negatif dengan risiko kredit bank. Bank yang lebih besar memiliki kemampuan untuk dapat mengelola risiko kreditnya dengan lebih baik dibandingkan dengan bank yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan lebih banyak peluang yang dimiliki oleh bank besar untuk mengejar pinjaman yang lebih luas. Hasil penelitian Srairi (2019) juga menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara *leverage* dengan risiko kredit, variabel efisiensi berpengaruh negatif terhadap risiko kredit, variabel pertumbuhan aset berpengaruh negatif terhadap risiko kredit. Namun, hasil penelitian ini serupa dengan Srairi (2019), yang menemukan bahwa variabel *operating leverage* tidak berpengaruh terhadap risiko kredit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi memiliki pengaruh negatif terhadap risiko kredit. Apabila nilai transparansi mengalami kenaikan, maka nilai risiko kredit akan menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi praktik pengungkapan informasi (transparansi), maka jumlah kredit macet dalam suatu bank semakin rendah, sehingga risiko kredit semakin kecil.
2. Dewan Pengawas Syariah dapat memperkuat pengaruh transparansi di bank syariah. Pengaruh tersebut diperoleh melalui jumlah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam setahun. Apabila jumlah rapat semakin meningkat, maka Dewan Pengawas Syariah akan memiliki lebih banyak waktu untuk berdiskusi dan bertukar informasi antar anggota. Selain itu, peningkatan jumlah rapat membuat Dewan Pengawas Syariah lebih mudah untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan di dalam bank syariah. Meskipun jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dapat memperkuat hubungan transparansi, tetapi hal tersebut tidak dapat menurunkan risiko kredit di bank syariah.
3. Unsur Tata Kelola Perusahaan dalam transparansi berpengaruh langsung terhadap risiko kredit di bank syariah. Apabila informasi mengenai tata

kelola perusahaan semakin banyak, maka tingkat risiko kredit yang ada di bank syariah menjadi semakin rendah.

5.2 Saran

Hasil pengujian variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu risiko kredit secara simultan hanya berpengaruh sebesar 18.7%, sehingga masih terdapat sisa sebesar 81.3% dari variabel lain yang dapat memengaruhi risiko kredit. Sementara variabel moderasi, menghasilkan pengaruh sebesar 13.8%, di mana masih ada sisa sebesar 86.2% dari variabel lain selain jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang dapat memperkuat hubungan antara transparansi dengan risiko kredit. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti di masa depan untuk memasukkan variabel lain dalam kriteria pengujian Dewan Pengawas Syariah, seperti latar belakang pendidikan atau keahlian anggota untuk memperkuat hubungan antara transparansi dengan risiko kredit. Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 30 bank dengan periode selama 5 tahun, sehingga disarankan kepada peneliti lain untuk menambah jumlah sampel atau periode waktu agar memperoleh nilai yang lebih besar dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic banking. *Review of Finance*, *17*, 2035–2096.
- Ahmad, N. H., & Ahmad, S. N. (2004). Key factors influencing credit risk of Islamic bank: A Malaysian case. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, *1(1)*, 65–80.
- Alexandre, H., Bouaiss, K., & Refait-Alexandre, C. (2010). Will bank transparency really help financial markets and regulators?. Working paper no. 7.
- Alman, M. (2012). Shariah supervisory board composition effects on Shariah compliance in contemporary Islamic Finance. *Journal of Banking Regulation*, *14(2)*, 134–163.
- Aman, H., & Nguyen, P. (2013). Does good governance matter to debtholders? Evidence from the credit ratings of Japanese firms. *Research in International Business and Finance*, *29*, 14–34.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Islamic Bank. Jakarta: Gema Insani.
- Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *4(1)*.
- Ariffin, N. M., Archer, S., & Abdel Karim, R. A. (2007). Transparency and market discipline in Islamic banks. In *Advances in Islamic economics and finance, proceeding of the 6th international conference on Islamic economic and finance. Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute*, *153*, 166–545.
- Ariffin, N., Archer, S., & Karim, R. (2009). Risks in Islamic banks: Evidence from empirical research. *Journal of Banking Regulation*, *10(2)*, 153–163.
- Armstrong, Elia. (2005). Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. *United Nations*, 1–10.
- Bank for International Settlements. (2000). Principles for the Management of Credit Risk. Diperoleh pada 23 Oktober 2020 di: <https://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf>.
- Bank Indonesia (2004). Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Komersial yang Melakukan Bisnis berdasarkan Prinsip Syariah. Diperoleh pada 23 Oktober 2020 di: https://www.ojk.go.id/Files/201402/pbi062404_eng_1392970316.pdf.

- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 – Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Diperoleh pada 23 Oktober 2020 di: https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_112509.aspx.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Bank Umum Islam dan Unit Bisnis Islam. Diperoleh pada 23 Oktober 2020 di: https://www.ojk.go.id/Files/regulation/banking/bir/2009/pbi113309_eng.pdf.
- Basel Committee on Banking Supervision. (1998). Enhancing banking transparency, No.41. Basel, Switzerland: September.
- Bitar, M., Saad, W., & Benklemlih, M. (2016). Bank risk and performance in the MENA region : The importance of capital requirements. *Economic Systems*, 40, 398–421.
- Borgia, Fiammetta. (2005). Corporate Governance & Transparency Role Of Disclosure: How Prevent New Financial Scandals And Crimes?, Transnational Crime And Corruption Center. School Of International Service, American University, Washington D.C.
- Bourakba, C. & Zerargui, H. (2015). The relationship between credit risk and corporate governance in Islamic banking: An empirical study. *Issues in Business Management and Economic*, 3(4), 67–73.
- Bourgain, U., Pieretti, P., & Zanaj, S. (2012). Financial openness, disclosure and bank risk-taking in MENA countries. *Emerging Markets Review*, 13, 283–300.
- Broquet, Geneviève Causse (2012). La finance islamique (2e édition). Point Delta, Beyrouth, Liban.
- Budiman, F. (2016). Pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 1–21.
- Bushman, R., Piotroski, J., & Smith, A. (2004). What determines corporate transparency?. *Journal of Accounting Research*, 42(2), 207–252.
- Chariri, A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: the role of the sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183.
- Cheung, Y. L., Jiang, P., & Tan, W. (2010). A transparency disclosure index measuring disclosures: Chinese listed companies. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29, 259–280.

- Claessens, S., Klingebiel, D., & Laeven, L. (2001). Financial Restructuring in Banking and Corporate-Sector Crises. *The National Bureau of Economic Research*. Working paper no. 8386.
- Daoud, J. I. (2017). Multicollinearity and regression analysis. In *Journal of Physics: Conference Series*, 949(1), 012009. IOP Publishing.
- Dewany, F. W. (2015). Analysis of the effect of GCG quality on the financial performance of Islamic banks. *The Indonesian Accounting Review*, 5(2), 119–128.
- Dhouibi, R., Mabrouk, A., & Rouetbi, E. (2016). Bank transparency and risk taking: Empirical evidence from Tunisia. *International Journal of Economics and Finance*, 8(5), 111–123.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance Journal*, 46, 100488.
- Faisal, M., Hassan, M., Shahid, M. S., Rizwan, M., & Qureshi, Z. A. (2016). Impact of corporate governance on intellectual capital efficiency: evidence from KSE listed commercial banks. *Scientific International*, 28(4), 353–361.
- Flannery, M., & Thakor, A. V. (2006). Accounting, transparency and bank stability. *Journal of Financial Intermediation*, 15, 281–284.
- Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, cetakan ke IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goldstein, I., & Sapra, H. (2013). Should banks' stress test results be disclosed? An analysis of the costs and benefits. *Foundations and Trends in Finance*, 8(1), 1–54.
- Grassa, R., & Matoussi, H. (2014). Is corporate governance different for Islamic banks? A comparative analysis between the Gulf Cooperation Council and Southeast Asian countries. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 9(1), 27–51.
- Grassa, R. (2016). Corporate governance and credit rating in Islamic banks: does Shariah governance matters?. *Journal of Management & Governance*, 20(4), 875–906.

- Grassa, R., Moumen, N., & Hussainey, K. (2020). Is bank creditworthiness associated with risk disclosure behavior? Evidence from Islamic and conventional banks in emerging countries. *Journal Pacific-Basin Finance*, (61). Working paper no. 101327.
- Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2008). Risk analysis for Islamic banks, the international bank for reconstruction and development. Washington, D.C: The World Bank.
- Hayat, U., & Malik, A. (2014). Islamic Finance: ethics, concepts, practice. *Practice* (November 2014). CFA Institute Research Foundation L2014-3.
- Healy, P., & Palepu, K. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31, 405–440.
- Herawati, H., Rawi, R., & Destiana, R. (2019). Pengaruh ROA dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12.
- Hessel, N. S. T. (2003). Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank. Edisi 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- İncekara, A., & Çetinkaya, H. (2019). Credit Risk Management: A Panel Data Analysis on the Islamic Banks in Turkey. *Procedia Computer Science*, 158, 947–954.
- Jayaraman, S., & Kothari, S. P. (2012). The effect of industrial sector transparency on bank risk-taking and banking system fragility. *Available at SSRN 2138156*.
- John, K., Litov, L., & Yeung, B. (2008). Corporate governance and risk taking. *The Journal of Finance*, 4, 1679–1728.
- Khaldi, K., & Hamdouni, A. (2018). Islamic Financial Intermediation Compared to Ribaoui Financial Intermediation: A Theoretical and Mathematical Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 268–283
- Khan, T., & Ahmed, H. (2002). Credit Risk Management in Islamic Banking. *Journal of Islamic Economic*, 10, 19–39.

- Khamim. (2011). Risiko Bank Syariah. Diperoleh pada 31 Maret 2020 di: <http://khamimekonomiislam.blogspot.com/2011/04/risiko-bank-syariah.html?m=1>.
- Kondo, Seiichi. (2002). Fostering Dialogue to Strengthen Good Governance. *Public Sector Transparency and Accountability*, 7–11.
- Kuang, Y. F., & Qin, B. (2013). Credit ratings and CEO risk-taking incentives. *Contemporary Accounting Research*, 30(4), 1524–1559.
- Kusuma, H., & Ayumardani, A. (2016). The corporate governance efficiency and Islamic bank performance: an Indonesian evidence. *Polish journal of management studies*, 13(1), 111–120.
- Lahrech, N., Lahrech, A., & Boulaksil, Y. (2014). Transparency and performance in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 61–88.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social reporting by Islamic banks. *ABACUS*, 42(2), 266–289.
- Malim, N.A. (2015). Islamic banking and risk management: issues and challenges. *Journal of Islamic Banking And Finance*, 32(4), 62–68.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435.
- Morris, S., & Shin, H. (2002). Social value of public information. *The American Economic Review*, 92(5), 1521–1534.
- Neifar, S., & Jarboui, A. (2018). Corporate governance and operational risk voluntary disclosure: Evidence from Islamic banks. *Research in International Business and Finance*, (46), 43–54.
- NG, J., & Rusticus, T. (2012). Bank's survival during the financial crisis; the role of regulation reporting quality. *World Finance and banking Symposium*, (17).
- Nomran, N.M., Haron, R. & Hassan, R. (2017). Bank performance and Shari'ah supervisory board attributes by Islamic banks: does bank size matter? *Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, 174–187.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304.
- Nurkhin, H. M. I. A., & Rohman, A. (2020). Corporate governance mechanism and risk disclosure by Islamic banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 15(1), 1–10.

- Safieddine, A. (2009). Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory. *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 142–158.
- Saufanny, A. D., & Khomsatun, S. (2017). Corporate Governance Dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1), 47–61.
- Setyowati, M., dan Amanah, L. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Earning Per Share dan Leverage Terhadap Return Saham. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6, 1–19.
- Skaife, A. H., Collins, D. W., & LaFond, R. (2006). The effects of corporate governance on firms' credit ratings. *Journal of Accounting and Economics*, (42), 203–243.
- Srairi, S. (2019). Transparency and bank risk-taking in GCC Islamic banking. *Borsa Istanbul Review*, (19), 64–74.
- Standard and Poor's. (2002). Standard and poor's corporate governance scores: Criteria, methodology and definition. New York: McGraw Hill Companies, Inc.
- Surat Edaran Bank Sentral Indonesia. (2010). Surat Edaran Bank Sentral Indonesia No.12/13/DPBS/2010 – Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diperoleh pada 23 Oktober 2020 di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Pages/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-12-13-dpbs-3.aspx>.
- Switzer, L. N., & Wang, J. (2013). Default risk estimation, bank credit risk, and corporate governance. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 22(2), 91–112.
- Tadesse, S. (2006). The Economic value of regulated disclosure: Evidence from the banking sector. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(1), 32–70.
- Toufik, B.B. 2015. The role of Shari'ah supervisory board in ensuring good corporate governance practice in Islamic banks. *International Journal of Contemporary Applied Sciences*, 2(2), 109–118.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diperoleh pada 23 Oktober 2020 di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.
- Wang, Z., Chen, J., Wan, Y., Jin, Y., & Mazzanti, J. A. (2015). Information disclosure and bank risk-taking under a partially implicit deposit insurance system: Evidence from China. *The Australian Economic Review*, 48(2), 163–176.

- Wasiuzzaman, S., & Gunasegavan, U. N. (2013). Comparative study of the performance of Islamic and conventional banks. *Humanomics*, 29 (1), 43–60.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Wijethunga, I.I. & Ekanayake, E. 2015. Element of corporate governance in Islamic banks vs conventional banks: A case study. *Journal of Islamic Banking and Finance* 3(1): 44–49.
- YÜCEMEMİŞ, B. T., SÖZER, İ., & SÖZER, İ. A. (2010). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TAKİPTEKİ KREDİLER: MUKAYESELİ KRİZ PERFORMANSI. *Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi*, 18(1&2), 89–119.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Bank-Bank Syariah

No	Nama Bank Syariah	Jenis Bank
1	PT. Bank Aceh Syariah.	Bank Umum
2	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah.	Bank Umum
3	PT. Bank Muamalat Indonesia.	Bank Umum
4	PT. Bank Victoria Syariah.	Bank Umum
5	PT. Bank BRISyariah.	Bank Umum
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah.	Bank Umum
7	PT. Bank BNI Syariah.	Bank Umum
8	PT. Bank Syariah Mandiri.	Bank Umum
9	PT. Bank Mega Syariah.	Bank Umum
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah.	Bank Umum
11	PT. Bank Syariah Bukopin.	Bank Umum
12	PT. BCA Syariah.	Bank Umum
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Syariah.	Bank Umum
14	PT. Maybank Syariah Indonesia.	Bank Umum
15	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.	Unit Usaha Syariah
16	PT. Bank Permata, Tbk.	Unit Usaha Syariah
17	PT. BPD Kalimantan Barat.	Unit Usaha Syariah
18	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	Unit Usaha Syariah
19	PT. BPD Kalimantan Selatan.	Unit Usaha Syariah
20	PT. Bank Sinarmas.	Unit Usaha Syariah
21	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	Unit Usaha Syariah
22	PT. BPD DKI.	Unit Usaha Syariah
23	PT. BPD Kalimantan Timur.	Unit Usaha Syariah
24	PT. BPD Jawa Tengah.	Unit Usaha Syariah
25	PT. BPD Jawa Timur, Tbk.	Unit Usaha Syariah
26	PT. BPD Sumatera Utara.	Unit Usaha Syariah
27	PT. BPD Jambi.	Unit Usaha Syariah
28	PT. BPD Sumatera Barat.	Unit Usaha Syariah
29	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau.	Unit Usaha Syariah
30	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.	Unit Usaha Syariah

Lampiran 2

Daftar Dimensi dan Item Transparansi

DIMENSI & ITEM INDEKS TRANSPARANSI
1. Informasi Umum
Laporan keuangan tahunan terdiri dari:
<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan tata kelola perusahaan. • Laporan direktur. • Laporan auditor. • Laporan komite syariah. • Neraca keuangan. • Laporan laba rugi. • Laporan arus kas. • Kebijakan akuntansi. • Catatan penjelasan.
Organisasi bank:
<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi dasar. • Struktur manajemen senior. • Jaringan cabang. • Jumlah karyawan.
Bisnis dasar:
<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan tujuan dan sasaran bank, strategi dan kemajuan. • Tren lingkungan dan industri yang kompetitif. • Garis prinsip bisnis, produk dan pasar.
Gambaran kinerja:
<ul style="list-style-type: none"> • Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan bank tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. • Analisis kinerja berdasarkan segmen bisnis utama. • Faktor-faktor yang akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja masa depan. • Analisis likuiditas bank dan tentang pembiayaan tambahan. • Analisis posisi keuangan bank.
Peringkat oleh lembaga pemeringkat
2. Informasi Keuangan
Pengungkapan pembiayaan, uang muka dan pinjaman lainnya:
<ul style="list-style-type: none"> • menurut jenis, misalnya jalur kas, pembiayaan berjangka, dan tagihan tagihan. • Kontrak, seperti murabahah, mudharaba, musyarakah, ijara, dll. • Menurut jenis nasabah, seperti lembaga perbankan domestik, perusahaan bisnis domestik, pemerintah dan badan hukum, individu, dll. • Sensitivitas tingkat keuntungan, misalnya tarif tetap atau tarif variabel.

DIMENSI & ITEM INDEKS TRANSPARANSI
<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan sektor, seperti pertanian, manufaktur, <i>real estate</i>, keuangan, asuransi dan layanan bisnis.
Setoran dari pelanggan:
<ul style="list-style-type: none"> Menurut jenis, seperti tabungan, deposito saat ini dan berjangka.
<ul style="list-style-type: none"> Menurut jenis pelanggan, misalnya pemerintah atau perusahaan bisnis.
<ul style="list-style-type: none"> Struktur jatuh tempo deposito berjangka, misalnya <6 bulan, 6-12 bulan, 1-3 tahun.
Akun investasi:
<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan tujuan investasi umum dan kebijakan yang mengatur pengelolaan akun investasi.
Klasifikasi menurut:
<ul style="list-style-type: none"> Jenis akun investasi, seperti akun investasi yang tidak dibatasi atau dibatasi.
<ul style="list-style-type: none"> Jenis pelanggan.
<ul style="list-style-type: none"> Struktur kematangan.
<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan pengembalian dari setiap jenis akun investasi.
<ul style="list-style-type: none"> Bank mengungkapkan informasi terkait dengan metode yang digunakan dalam mengalokasikan dan mendistribusikan keuntungan antara pemegang saham dan IAH.
<ul style="list-style-type: none"> Dasar-dasar yang diterapkan dalam pemanfaatan cadangan perimbangan laba (PER).
<ul style="list-style-type: none"> Bank mengungkapkan catatan terkait penggunaan cadangan risiko investasi (IRR).
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan yang terjadi selama periode keuangan pada PER dan IRR.
Pengungkapan rasio kecukupan modal (CAR) dan menunjukkan secara terpisah rasio modal ekuitas tingkat 1, rasio modal inti dan rasio modal total.
Pengungkapan cadangan dengan perincian menurut jenis dan tujuan cadangan yang dipertahankan.
Perincian aset tertimbang menurut risiko bruto dalam berbagai bobot risiko.
Persyaratan kecukupan modal untuk berbagai kategori risiko (risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional) menurut masing-masing kategori kontak pembiayaan berbasis syariah.
Bank mengungkapkan sifat dan jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi secara terpisah untuk setiap kategori surat berharga dan aset lain yang timbul dari penggunaan dana deposito atau dana selain dana yang dibatasi penggunaannya.
Pengungkapan pendapatan nirlaba dan beban operasional lainnya dengan rincian pos utama pendapatan atau beban.
Pengungkapan pendapatan dan pengeluaran oleh sumber dana, misalnya

DIMENSI & ITEM INDEKS TRANSPARANSI
deposito Islam dan dana pemegang saham menurut kategori aset atau kewajiban keuangan).
Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas syariah yang tidak sesuai:
<ul style="list-style-type: none"> • Sifat aktivitas syariah yang tidak sesuai. • Jumlah pendapatan syariah yang tidak sesuai.
Sumber sumbangan atau dana amal, serta pengungkapan penggunaan dana tersebut.
Zakat:
<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan sumber zakat. • Metode yang diterapkan dalam menentukan basis Zakat, misalnya metode pertumbuhan atau metode modal kerja. • Penyaluran zakat dan penerima.
3. Tata Kelola Bank Umum
Identitas pemegang saham utama.
Berbagai kepemilikan saham.
Identitas manajer.
Identitas anggota dewan dan afiliasi.
Remunerasi pejabat dan karyawan.
Remunerasi anggota dewan.
Kepemilikan saham direksi dan karyawan.
Kepemilikan saham anggota dewan tersedia.
Kumpulan kriteria yang telah ditetapkan pada saat pemilihan anggota dewan.
Jumlah rapat dewan yang diadakan dalam setahun.
Kehadiran setiap anggota dewan.
Bank telah menerapkan prosedur penilaian dewan secara berkala.
4. Keterbukaan Tata Kelola Syariah
Nama, kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah
Berbagai kepemilikan saham.
Bank mengungkapkan informasi remunerasi anggota.
Bank memiliki kebijakan formal tentang tugas dan tanggung jawab DPS.
Bank mengungkapkan kehadiran setiap anggota.
Anggota DPS dipilih dan diberhentikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh bank.
Bank mengungkapkan laporan DPS atas kesesuaian operasional bank syariah dengan prinsip syariah.
5. Manajemen Risiko
Pengungkapan manajemen risiko secara umum:
<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan tentang tujuan, strategi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko bank menurut kategori risiko atau secara agregat. • Informasi tentang struktur manajemen risiko.

DIMENSI & ITEM INDEKS TRANSPARANSI
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang komite manajemen risiko.
<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan dan sifat pengukuran risiko dan sistem pelaporan.
<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan risiko teratas yang muncul dari model bisnis dan aktivitas bank.
<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan kisaran dan ukuran risiko yang dihadapi setiap dana IAH yang dibatasi berdasarkan kebijakan investasi spesifiknya.
Risiko kredit:
<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan tentang kebijakan dan tujuan manajemen risiko kredit bank.
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang struktur manajemen risiko kredit.
<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kualitatif dan kuantitatif dari risiko pihak lawan bank yang timbul dari transaksi derivatif.
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi kualitatif tentang mitigasi risiko kredit disediakan.
<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan tentang jenis utama agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya yang dilakukan oleh bank.
<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan jumlah dan perubahan provisi kerugian selama tahun buku.
<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan hukuman yang dikenakan pada pelanggan karena gagal bayar, dan disposisi uang yang diterima sebagai hukuman.
Risiko likuiditas:
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang aset likuid bank yang tersedia serta sumber dan penggunaan dana.
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi jatuh tempo tentang simpanan dan kewajiban lainnya.
<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan kerangka kerja manajemen risiko likuiditas dalam menangani eksposur risiko untuk setiap kategori pendanaan serta secara agregat: giro; akun investasi yang tidak dibatasi dan akun investasi yang dibatasi.
<ul style="list-style-type: none"> • Informasi umum tentang kebijakan untuk mengatasi risiko likuiditas dengan mempertimbangkan kemudahan akses ke dana yang sesuai dengan syariah dan keragaman sumber pendanaan.
Risiko pasar:
<ul style="list-style-type: none"> • Uraian umum dan pengungkapan kerangka kerja yang tepat untuk manajemen risiko pasar.
<ul style="list-style-type: none"> • Rincian kualitatif dan kuantitatif dari faktor risiko pasar perdagangan dan <i>non</i>-perdagangan yang signifikan dan mungkin relevan dengan portofolio bank.
<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif risiko pasar yang signifikan, seperti pengukuran, batasan model, asumsi, prosedur validasi, penggunaan proxy, perubahan ukuran risiko dan model sepanjang waktu.
<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan nilai pada risiko atau pendekatan sensitivitas lainnya untuk berbagai jenis risiko pasar, seperti risiko nilai

DIMENSI & ITEM INDEKS TRANSPARANSI
tukar, dan risiko harga komoditas.
Risiko operasional:
<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan untuk memasukkan ukuran risiko operasional ke dalam kerangka kerja manajemen, seperti penganggaran, penetapan target, dan kepatuhan tinjauan kinerja.
<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang proses.
<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang proses mitigasi kerugian melalui perencanaan kontinjensi, perencanaan kesinambungan bisnis, pelatihan staf dan peningkatan pengendalian internal, serta proses bisnis dan infrastruktur.
<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan ATMR yang setara untuk risiko operasional.
Risiko tingkat pengembalian:
<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian dan suku bunga acuan.
<ul style="list-style-type: none"> • Proses dan sistem untuk memantau dan mengukur faktor-faktor yang menimbulkan risiko tingkat pengembalian.
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator eksposur risiko tingkat pengembalian, seperti data pembayaran/penerimaan yang diharapkan atas pembiayaan dan pendanaan, serta biaya pendanaan pada periode jatuh tempo yang berbeda sesuai dengan waktu jatuh tempo atau waktu reprising untuk aset atau pendanaan dengan suku bunga mengambang.
<ul style="list-style-type: none"> • Analisis sensitivitas profitabilitas bank dan tingkat pengembalian harga atau pergerakan tingkat profitabilitas di pasar.
Risiko lainnya:
<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan jenis risiko lain yang diidentifikasi oleh manajemen.
<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan kebijakan bank atas risiko tersebut, seperti ukuran dan indikator yang digunakan.

Lampiran 3

Hasil Perhitungan NPL

No.	Nama Bank	NPL				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	3.89	3.19	4.75	4.97	3.38
2.	BNI Syariah	1.46	1.64	1.5	1.52	1.44
3.	PT. Bank Aceh Syariah	0.81	0.07	0.04	0.04	0.04
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	0.47	0.41	0.25	0.57	0.61
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	4.2	1.4	2.75	2.58	4.3
6.	PT. Bank Victoria Syariah	4.85	4.35	4.08	3.46	2.64
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	4.39	4.92	2.85	1.89	1.5
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	4.05	3.13	2.71	1.56	1
9.	PT. Bank Mega Syariah	3.16	2.81	2.75	1.96	1.49
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	1.94	1.86	4.83	3.84	2.8
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	2.74	4.66	4.18	3.65	4.05
12.	PT. BCA Syariah	0.52	0.21	0.04	0.28	0.26
13.	PT. BTPN Syariah	0.17	0.2	0.05	0.02	0.26
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	0.55	0.93	0.22	1.53	1.38
15.	PT. BPD Jawa Timur	0.58	1.44	0.84	0.71	0.42
16.	PT. Bank Sinarmas	0.5	0.75	2.65	2.59	0.77
17.	PT. Maybank Indonesia	3.88	2.85	2	1.92	1.57
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	0.12	0.28	0.11	0.12	0.06
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	3.36	2.61	2.37	1.64	2.78
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	7.45	5.43	6.01	4.06	3.87
21.	PT. BPD Jambi	0.04	0	0.02	0.07	0.03
22.	PT. BPD Sumatera Barat	1.57	1.45	1.26	0.89	0.86
23.	PT. BPD Sumatera Utara	9.95	8.07	9.2	7.74	12.46
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	1.95	0.45	0.1	0.32	0.19
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	0.14	0.14	0.43	0.48	0.43
26.	PT. Bank Permata	1.13	2.04	0.95	0.58	1.07
27.	PT. Bank Tabungan Negara	0.44	0.66	0.76	3.18	5.44
28.	PT. BPD DKI	2.82	0.86	0.64	0.6	0.68
29.	PT. BPD Jawa Tengah	0.22	0.21	0.06	0.08	0.32
30.	PT. Bank CIMB Niaga	0.44	0.5	0.27	0.39	0.52

Lampiran 4

Daftar Jumlah Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama Bank	Jumlah Dewan Pengawas Syariah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	2	2	2	2	2
2.	BNI Syariah	2	2	2	2	3
3.	PT. Bank Aceh Syariah	2	2	2	2	2
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	3	3	2	2	2
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	3	3	3	3	2
6.	PT. Bank Victoria Syariah	2	2	2	2	2
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	3	3	3	3	3
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	3	3	3	3	3
9.	PT. Bank Mega Syariah	3	3	3	2	2
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2	2	2	2	2
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	2	2	2	2	2
12.	PT. BCA Syariah	2	2	2	2	2
13.	PT. BTPN Syariah	2	2	2	2	2
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	3	3	2	3	3
15.	PT. BPD Jawa Timur	3	3	3	3	2
16.	PT. Bank Sinarmas	2	2	2	2	2
17.	PT. Maybank Indonesia	3	3	3	3	3
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	3	3	3	3	2
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	2	3	2	2	2
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	2	2	1	2	2
21.	PT. BPD Jambi	2	2	2	2	2
22.	PT. BPD Sumatera Barat	3	3	3	3	3
23.	PT. BPD Sumatera Utara	3	2	3	3	3
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	2	2	2	2	2
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	3	2	2	2	2
26.	PT. Bank Permata	2	2	2	2	2
27.	PT. Bank Tabungan Negara	3	3	3	3	2
28.	PT. BPD DKI	3	3	3	2	2
29.	PT. BPD Jawa Tengah	2	2	2	2	2
30.	PT. Bank CIMB Niaga	3	3	3	3	3

Lampiran 5

Daftar Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama Bank	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	14	12	12	12	16
2.	BNI Syariah	15	13	19	26	22
3.	PT. Bank Aceh Syariah	7	7	10	20	36
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	6	0	0	7	36
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	12	12	12	12	13
6.	PT. Bank Victoria Syariah	12	13	23	16	15
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0	18	12	17	21
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	15	12	9	9	12
9.	PT. Bank Mega Syariah	0	12	8	12	8
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	16	21	27	9	12
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	0	0	14	13	14
12.	PT. BCA Syariah	15	8	14	14	12
13.	PT. BTPN Syariah	12	0	12	12	12
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	13	12	12	12	12
15.	PT. BPD Jawa Timur	12	12	9	14	0
16.	PT. Bank Sinarmas	12	12	12	12	12
17.	PT. Maybank Indonesia	29	17	23	23	21
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	19	0	0	0	0
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	12	12	0	13	0
21.	PT. BPD Jambi	12	12	15	15	13
22.	PT. BPD Sumatera Barat	20	14	27	25	30
23.	PT. BPD Sumatera Utara	0	0	10	12	12
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	10	11	13	13	15
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	12	0	9	12	0
26.	PT. Bank Permata	12	12	17	22	17
27.	PT. Bank Tabungan Negara	16	19	17	12	10
28.	PT. BPD DKI	0	12	16	0	0
29.	PT. BPD Jawa Tengah	14	13	13	12	12
30.	PT. Bank CIMB Niaga	12	12	24	12	13

Lampiran 6

Hasil Perhitungan Transparansi*Jumlah DPS

No.	Nama Bank	Transparansi*Jumlah DPS				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	162	166	166	166	166
2.	BNI Syariah	168	168	168	168	252
3.	PT. Bank Aceh Syariah	152	158	158	158	158
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	246	243	162	164	164
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	261	261	261	261	174
6.	PT. Bank Victoria Syariah	126	152	152	152	152
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	234	246	246	246	246
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	249	261	261	261	261
9.	PT. Bank Mega Syariah	216	234	246	164	164
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	168	170	168	168	172
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	158	162	164	164	164
12.	PT. BCA Syariah	160	164	162	164	164
13.	PT. BTPN Syariah	162	160	162	162	162
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	252	252	168	252	252
15.	PT. BPD Jawa Timur	249	249	255	255	170
16.	PT. Bank Sinarmas	174	174	174	174	174
17.	PT. Maybank Indonesia	249	249	249	249	249
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	240	240	252	252	168
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	160	240	160	160	160
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	152	154	77	152	152
21.	PT. BPD Jambi	148	160	160	160	158
22.	PT. BPD Sumatera Barat	231	231	231	231	231
23.	PT. BPD Sumatera Utara	210	152	225	231	234
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	158	158	158	158	158
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	225	150	142	162	154
26.	PT. Bank Permata	140	134	134	134	134
27.	PT. Bank Tabungan Negara	198	198	210	210	140
28.	PT. BPD DKI	234	234	234	156	156
29.	PT. BPD Jawa Tengah	160	162	162	162	162
30.	PT. Bank CIMB Niaga	240	237	234	234	237

Lampiran 7

Hasil Perhitungan Transparansi*Jumlah Rapat DPS

No.	Nama Bank	Transparansi*Jumlah Rapat DPS				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	1134	996	996	996	1328
2.	BNI Syariah	1260	1092	1596	2184	1848
3.	PT. Bank Aceh Syariah	532	553	790	1580	2844
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	492	0	0	574	2952
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	1044	1044	1044	1044	1131
6.	PT. Bank Victoria Syariah	756	988	1748	1216	1140
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0	1476	984	1394	1722
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	1245	1044	783	783	1044
9.	PT. Bank Mega Syariah	0	936	656	984	656
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	1344	1785	2268	756	1032
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	0	0	1148	1066	1148
12.	PT. BCA Syariah	1200	656	1134	1148	984
13.	PT. BTPN Syariah	972	0	972	972	972
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	1092	1008	1008	1008	1008
15.	PT. BPD Jawa Timur	996	996	765	1190	0
16.	PT. Bank Sinarmas	1044	1044	1044	1044	1044
17.	PT. Maybank Indonesia	2407	1411	1909	1909	1743
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	1520	0	0	0	0
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	912	924	0	988	0
21.	PT. BPD Jambi	888	960	1200	1200	1027
22.	PT. BPD Sumatera Barat	1540	1078	2079	1925	2310
23.	PT. BPD Sumatera Utara	0	0	750	924	936
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	790	869	1027	1027	1185
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	900	0	639	972	0
26.	PT. Bank Permata	840	804	1139	1474	1139
27.	PT. Bank Tabungan Negara	1056	1254	1190	840	700
28.	PT. BPD DKI	0	936	1248	0	0
29.	PT. BPD Jawa Tengah	1120	1053	1053	972	972
30.	PT. Bank CIMB Niaga	960	948	1872	936	1027

Lampiran 8

Hasil Perhitungan Ukuran Bank

No.	Nama Bank	Ukuran Bank				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	17.00	17.14	17.27	17.45	17.58
2.	BNI Syariah	16.95	17.16	17.37	17.53	17.73
3.	PT. Bank Aceh Syariah	16.74	16.75	16.93	16.96	17.04
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	15.63	15.85	16.00	15.77	15.97
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	17.86	17.84	17.94	17.86	17.74
6.	PT. Bank Victoria Syariah	14.14	14.30	14.51	14.57	14.63
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	15.68	15.82	15.86	15.72	15.86
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	18.07	18.18	18.29	18.40	18.54
9.	PT. Bank Mega Syariah	15.53	15.63	15.77	15.81	15.90
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	15.78	15.99	15.97	15.99	16.23
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	15.58	15.75	15.78	15.66	15.72
12.	PT. BCA Syariah	15.29	15.42	15.60	15.77	15.97
13.	PT. BTPN Syariah	15.46	15.81	16.03	16.30	16.55
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	15.09	15.18	15.42	15.47	15.44
15.	PT. BPD Jawa Timur	14.34	14.56	14.73	14.62	14.69
16.	PT. Bank Sinarmas	14.78	14.89	15.29	15.35	15.46
17.	PT. Maybank Indonesia	16.59	16.96	17.12	17.22	17.30
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	14.08	14.21	14.28	14.40	14.39
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	14.14	14.34	14.69	14.81	14.56
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	13.34	13.65	14.01	14.10	14.37
21.	PT. BPD Jambi	12.42	13.31	13.98	13.88	13.80
22.	PT. BPD Sumatera Barat	14.06	14.11	14.14	14.19	14.37
23.	PT. BPD Sumatera Utara	14.46	14.67	14.83	14.87	14.95
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	13.84	14.17	14.66	14.79	14.92
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	13.55	13.54	13.71	13.85	14.14
26.	PT. Bank Permata	16.54	16.58	16.86	16.91	16.90
27.	PT. Bank Tabungan Negara	16.40	16.71	16.97	17.16	17.16
28.	PT. BPD DKI	15.06	15.20	15.25	15.55	15.64
29.	PT. BPD Jawa Tengah	14.10	14.95	15.24	15.45	15.56
30.	PT. Bank CIMB Niaga	16.02	16.36	16.98	17.35	17.56

Lampiran 9

Hasil Perhitungan *Leverage*

No.	Nama Bank	<i>Leverage</i>				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	0.61	0.57	0.58	0.50	0.44
2.	BNI Syariah	0.45	0.45	0.41	0.38	0.32
3.	PT. Bank Aceh Syariah	0.23	0.26	0.29	0.23	0.23
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	0.01	0.02	0.02	0.24	0.41
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	0.49	0.47	0.49	0.49	0.43
6.	PT. Bank Victoria Syariah	0.76	0.71	0.72	0.70	0.72
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0.65	0.62	0.64	0.07	0.03
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	0.44	0.45	0.41	0.02	0.02
9.	PT. Bank Mega Syariah	0.63	0.66	0.57	0.61	0.59
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0.71	0.67	0.77	0.68	0.72
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	0.65	0.63	0.61	0.57	0.63
12.	PT. BCA Syariah	0.66	0.67	0.66	0.64	0.52
13.	PT. BTPN Syariah	0.58	0.59	0.56	0.49	0.48
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	0.57	0.65	0.56	0.54	0.51
15.	PT. BPD Jawa Timur	0.68	1.16	1.04	1.10	0.97
16.	PT. Bank Sinarmas	0.66	0.56	0.30	0.41	0.54
17.	PT. Maybank Indonesia	0.29	0.34	0.41	0.54	0.60
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	0.20	0.24	0.24	0.28	0.21
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	0.32	0.24	0.46	0.31	0.17
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	0.14	0.16	0.18	0.19	0.31
21.	PT. BPD Jambi	0.27	0.15	0.21	0.53	0.28
22.	PT. BPD Sumatera Barat	0.48	0.38	0.46	0.53	0.66
23.	PT. BPD Sumatera Utara	0.46	0.47	0.50	0.48	0.44
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	0.34	0.37	0.60	0.57	0.41
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	0.41	0.55	0.48	0.46	0.36
26.	PT. Bank Permata	0.37	0.27	0.23	0.25	0.33
27.	PT. Bank Tabungan Negara	0.57	0.54	0.49	0.51	0.48
28.	PT. BPD DKI	0.50	0.76	0.68	0.44	0.13
29.	PT. BPD Jawa Tengah	0.33	0.40	0.28	0.16	0.11
30.	PT. Bank CIMB Niaga	0.43	0.34	0.46	0.35	0.54

Lampiran 10

Hasil Perhitungan Efisiensi

No.	Nama Bank	Efisiensi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	-1.34	-1.48	-1.50	-1.65	-1.73
2.	BNI Syariah	-1.43	-1.56	-1.81	-1.71	-1.79
3.	PT. Bank Aceh Syariah	1.32	1.20	1.28	1.26	1.30
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	-0.18	-0.15	-0.17	-0.36	-0.50
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	-2.46	-2.22	-2.30	-1.96	-1.79
6.	PT. Bank Victoria Syariah	-1.96	-1.57	-3.09	-3.02	-3.16
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2.53	2.28	2.03	1.85	1.95
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	-1.69	-1.61	-1.44	-1.33	-1.54
9.	PT. Bank Mega Syariah	1.01	1.18	1.34	-1.10	-1.10
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	1.69	1.74	1.65	1.52	1.27
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	-1.65	1.80	1.67	1.80	1.62
12.	PT. BCA Syariah	1.51	1.62	1.55	1.59	1.53
13.	PT. BTPN Syariah	-1.23	-1.40	-1.55	-2.04	-2.24
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	2.98	7.21	6.42	4.68	3.66
15.	PT. BPD Jawa Timur	3.89	3.50	3.30	3.41	2.99
16.	PT. Bank Sinarmas	5.93	7.43	2.51	2.89	2.99
17.	PT. Maybank Indonesia	3.95	4.72	5.00	4.93	3.63
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	-14.22	-10.64	-11.10	-11.86	9.38
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	2.39	3.58	3.47	3.38	4.81
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	3.07	3.50	4.38	4.58	6.26
21.	PT. BPD Jambi	7.19	8.88	9.86	15.61	14.38
22.	PT. BPD Sumatera Barat	9.84	9.04	8.11	7.46	6.78
23.	PT. BPD Sumatera Utara	2.08	2.68	2.66	3.38	3.16
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	4.96	7.20	10.88	10.35	13.32
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	7.94	8.64	8.78	7.89	8.61
26.	PT. Bank Permata	6.30	2.40	3.57	4.76	4.69
27.	PT. Bank Tabungan Negara	5.72	7.27	9.07	5.13	5.84
28.	PT. BPD DKI	2.99	4.79	5.81	6.97	9.04
29.	PT. BPD Jawa Tengah	4.07	4.00	4.88	5.10	4.50
30.	PT. Bank CIMB Niaga	4.36	4.73	6.37	8.13	15.69

Lampiran 11

Hasil Perhitungan Pertumbuhan Aset

No.	Nama Bank	Pertumbuhan Aset				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	0.19	0.14	0.14	0.20	0.14
2.	BNI Syariah	0.18	0.23	0.23	0.18	0.22
3.	PT. Bank Aceh Syariah	0.13	0.01	0.21	0.02	0.09
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	0.05	0.25	0.16	-0.21	0.23
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	-0.08	-0.02	0.11	-0.07	-0.12
6.	PT. Bank Victoria Syariah	-0.04	0.18	0.23	0.06	0.06
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0.06	0.16	0.04	-0.13	0.15
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	0.05	0.12	0.12	0.12	0.14
9.	PT. Bank Mega Syariah	-0.21	0.10	0.15	0.04	0.09
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0.15	0.23	-0.01	0.02	0.27
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	0.13	0.18	0.04	-0.12	0.06
12.	PT. BCA Syariah	0.45	0.15	0.19	0.18	0.22
13.	PT. BTPN Syariah	0.40	0.41	0.25	0.31	0.28
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	0.23	0.10	0.27	0.05	-0.02
15.	PT. BPD Jawa Timur	0.36	0.25	0.19	-0.11	0.07
16.	PT. Bank Sinarmas	0.33	0.11	0.49	0.06	0.12
17.	PT. Maybank Indonesia	1.23	0.45	0.17	0.11	0.08
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	0.09	0.13	0.08	0.12	-0.01
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	0.15	0.22	0.41	0.13	-0.22
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	0.05	0.37	0.44	0.10	0.31
21.	PT. BPD Jambi	0.29	1.43	0.95	-0.09	-0.08
22.	PT. BPD Sumatera Barat	0.04	0.05	0.03	0.06	0.19
23.	PT. BPD Sumatera Utara	0.05	0.23	0.18	0.05	0.08
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	0.01	0.39	0.63	0.14	0.14
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	0.05	-0.01	0.19	0.15	0.33
26.	PT. Bank Permata	-0.06	0.04	0.33	0.05	-0.01
27.	PT. Bank Tabungan Negara	0.19	0.37	0.29	0.21	0.00
28.	PT. BPD DKI	0.02	0.16	0.05	0.34	0.09
29.	PT. BPD Jawa Tengah	0.59	1.32	0.34	0.24	0.12
30.	PT. Bank CIMB Niaga	0.08	0.40	0.85	0.45	0.24

Lampiran 12

Hasil Perhitungan *Operating Leverage*

No.	Nama Bank	<i>Operating Leverage</i>				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	BRI Syariah	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005
2.	BNI Syariah	0.007	0.008	0.007	0.008	0.011
3.	PT. Bank Aceh Syariah	0.020	0.021	0.019	0.023	0.023
4.	PT. Nusa Tenggara Barat Syariah	0.014	0.012	0.012	0.014	0.013
5.	PT. Bank Muamalat Indonesia	0.043	0.047	0.043	0.059	0.062
6.	PT. Bank Victoria Syariah	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0.045	0.023	0.037	0.047	0.041
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	0.016	0.012	0.010	0.010	0.010
9.	PT. Bank Mega Syariah	0.061	0.053	0.045	0.046	0.040
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0.008	0.010	0.011	0.010	0.009
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	0.019	0.020	0.032	0.050	0.040
12.	PT. BCA Syariah	0.009	0.010	0.014	0.018	0.017
13.	PT. BTPN Syariah	0.034	0.025	0.021	0.015	0.014
14.	PT. Bank Danamon Indonesia	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
15.	PT. BPD Jawa Timur	0.012	0.013	0.011	0.012	0.010
16.	PT. Bank Sinarmas	0.013	0.014	0.009	0.008	0.008
17.	PT. Maybank Indonesia	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	PT. BPD Kalimantan Barat	0.006	0.008	0.021	0.020	0.020
19.	PT. BPD Kalimantan Timur	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006
20.	PT. BPD Kalimantan Selatan	0.012	0.009	0.006	0.006	0.004
21.	PT. BPD Jambi	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002
22.	PT. BPD Sumatera Barat	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
23.	PT. BPD Sumatera Utara	0.005	0.013	0.011	0.010	0.009
24.	PT. BPD Riau & Kep.Riau	0.012	0.008	0.005	0.005	0.004
25.	PT. BPD Sulawesi Selatan & Barat	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004
26.	PT. Bank Permata	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
27.	PT. Bank Tabungan Negara	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
28.	PT. BPD DKI	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002
29.	PT. BPD Jawa Tengah	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002
30.	PT. Bank CIMB Niaga	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000

Lampiran 13

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Variabel Transparansi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Informasi Umum	150	77	95	92.75	2.956
Informasi Keuangan	150	63	87	75.61	5.761
Tata Kelola Perusahaan	150	42	100	88.03	7.837
Keterbukaan Tata Kelola Syariah	150	29	100	85.07	18.864
Manajemen Risiko	150	53	84	70.72	6.861
Keseluruhan CDTI	150	63	87	79.93	4.952
Valid N (listwise)	150				

Statistik Deskriptif Variabel Dependen, Moderasi, dan Kontrol

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	150	.00	12.46	1.9581	2.15083
Jumlah Anggota DPS	150	1	3	2.39	.504
Jumlah Rapat DPS	150	0	36	12.00	7.381
Ukuran Bank	150	12.420	18.537	15.63634	1.294409
<i>Leverage</i>	150	.012	1.163	.45628	.210305
Efisiensi	150	-14.223	58.450	3.11794	6.489376
Pertumbuhan Aset	150	-.219	1.431	.17995	.238779
<i>Operating Leverage</i>	150	.000	.062	.01192	.014266
Valid N (listwise)	150				

Lampiran 14

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.69181121
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		1.247
Asymp. Sig. (2-tailed)		.089

Uji Multikolinearitas

Variabel	Kriteria	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Transparansi	Nilai <i>tolerance</i> > 10% dan VIF < 10	0,811	1,233	Tidak ada multikolinearitas
Ukuran Bank		0,904	1,106	
<i>Leverage</i>		0,966	1,035	
Efisiensi		0,846	1,183	
Pertumbuhan Aset		0,878	1,139	
<i>Operating Leverage</i>		0,754	1,326	

Uji Heteroskedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.225 ^a	.051	.011	11.09731

Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.265 ^a	.070	.031	2.11674	2.085



Lampiran 15

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

	NPL (Y_1)		Z-score (Y_2)	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
R Square	0.138	0.187	0.048	0.085
Adjusted R Square	0.108	0.128	0.015	0.019

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

	NPL (Y_1)			Z-score (Y_2)		
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 1	Model 2	Model 3
F	4.599	3.196	2.149	1.446	1.286	1.367
Sig.	0.001	0.001	0.063	0.211	0.244	0.240

Uji Statistik (Uji T)

Variabel	NPL (Y ₁)			Z-score (Y ₂)		
	Model 3	Model 1	Model 2	Model 3	Model 1	Model 2
1. Pengungkapan Transparansi (X)		-0.373** (-1.873)	-0.048** (-2.158)		0.004 (0.577)	0.002 (0.007)
- Informasi Umum	0.111 (1.480)			-0.004 (-1.297)		
- Informasi Keuangan	-0.004 (-0.006)			0.002 (0.997)		
- Tata Kelola Perusahaan	- 0.076** (-2.841)			0.000 (-0.036)		
- Keterbukaan Tata Kelola Syariah	0.000 (-0.055)			0.000 (0.053)		
- Manajemen Risiko	-0.003 (-0.110)			-0.002** (-2.128)		
2. Jumlah DPS (Z1)		0.733 (0.135)	0.323 (0.059)		0.266 (1.275)	0.212 (0.996)
3. Jumlah Rapat DPS (Z2)		-2.038** (-4.294)	-2.045** (-4.322)		-0.008 (-0.448)	-0.008 (-0.434)
4. Transparansi*Jumlah DPS (X*Z1)		-0.004 (-0.061)	-0.001 (-0.016)		-0.003 (-1.241)	-0.003 (-0.952)
5. Transparansi*Jumlah Rapat DPS (X*Z2)		0.025** (4.230)	0.025** (4.263)		0.000 (0.519)	0.000 (0.532)
Variabel Spesifik Bank:			0.080 (0.559)			-0.010 (-1.827)
6. Ukuran Bank			1.026 (1.254)			0.012 (0.385)
7. Leverage			-0.023 (-0.812)			-0.001 (-1.197)
8. Efisiensi			-1.015 (-1.359)			0.013 (0.454)
9. Pertumbuhan Aset			12.777 (0.948)			0.391 (0.746)
10. Operating Leverage						